

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS PENEMPATAN GURU PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) DI SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
KABUPATEN ACEH TENGAH**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HARI PRAWIRA

NIM. 501482917

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Aceh Tengah adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Takengon, Juli 2018

Yang menyatakan

**METERAI
TEMPEL**
TCL 20
8B66EAFF038839628

6000
ENAM RIBU RUPAH


Hari Prawira

NIM. 501482917

ABSTRACT**The Management of Replacing Elementary School Civil Servant Teachers
in Central Aceh Regency****Hari Prawira****Hariprawira4@gmail.com****Post Graduate Program****Of****Universitas Terbuka**

Education is a system which consists from some interrelated components. Therefore, managing each components so that they can run appropriately becomes necessary. One of the most important aspects of education is teachers. Teachers significantly hold important aspect to improve the quality of education and they become the central in every effort of educational reformations. Based on the data found by the researcher on pre-survey which was held in elementary schools in Central Aceh is the obstacle in distributing civil servant teachers in Central Aceh regency caused by number of civil servant teachers are going to be retired while the recruitment of new civil servant teachers is constrained by lack of budget in local government. This situation causes unbalancing between the need and the availability of teachers. Local government especially educational department in Central Aceh Regency is unable to distribute sufficient number of teachers for all schools in this area since it will affect the quality of education in town.

Key words: the management of replacing teacher

ABSTRAK**ANALISIS PENEMPATAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KABUPATEN ACEH TENGAH**

Hari Prawira

Hariprawira4@gmail.comProgram Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama dan saling berkaitan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan khusus untuk masing-masing komponen agar setiap komponen dapat bekerja dengan baik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan yaitu pendidik atau guru. Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Tengah, penempatan guru pegawai negeri sipil masih belum merata. Adapun kendala dalam pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Tengah banyaknya guru yang akan memasuki usia pensiun, sedangkan untuk merekrut pegawai negeri sipil baru mengalami keterbatasan anggaran sehingga menimbulkan permasalahan yakni ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan guru. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penempatan guru dan menganalisis kendala pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tengah. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Sekretaris Dinass Pendidikan, Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Seksi Mutasi Kepangkatan dan Jabatan, Kepala Sekolah, Guru Sekolah Dasar, Komite Sekolah, dan Murid Sekolah Dasar dalam Kabupaten Aceh Tengah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat melakukan pemerataan guru ke semua sekolah yang ada, karena kekurangan jumlah guru Pegawai Negeri Sipil dan akan mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah perkotaan.

Kata Kunci : *Analisis Penempatan Guru*

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Aceh Tengah

Penyusun TAPM: Hari Prawira

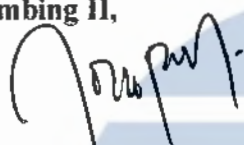
NIM : 501482917

Program Studi : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu/21 Juli 2018

Menyetujui:

Pembimbing II,



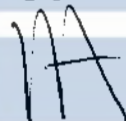
Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum
NIP. 19580625199303 1 002

Pembimbing I,



Dr. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si
NIDN. 1307027701

Penguji Ahli



Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A, Ph.D

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik



Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHSIP



Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D
NIP. 19440722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Hari Prawira
 NIM : 501482917
 Program Studi : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
 Judul TAPM : Analisis Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Aceh Tengah

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka Pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/21 Juli 2018

W a k t u : 13.30 – 15.00 Wib

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi

Nama: Dr. Sri Listyarini, M.Ed

Penguji Ahli

Nama : Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A, Ph.D

Pembimbing I

Nama: Dr. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si

Pembimbing II

Nama: Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum



Handwritten signatures of the committee members: Sri Listyarini, Muchlis Hamdi, Edy Putra Kelana, and Djoko Rahardjo.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul “ANALISIS PENEMPATAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KABUPATEN ACEH TENGAH”. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa pencerahan kehidupan bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan TAPM ini masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis sadari. Dengan selesainya Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Dr. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Djoko Rahardjo, M. Hum selaku Pembimbing II, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Dr. Lula, M.A, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh dan seluruh jajarannya;
4. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya;

5. Khusus penulis sampaikan kepada ayahanda Sinaria dan ibunda Zainah atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, begitu juga adik-adik penulis, mereka semua tidak pernah bosan memberikan dorongan semangat sekaligus mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan;
6. Istri tercinta Sulastri, S.Pd dan anak yang tersayang Qanitha Athaya yang senantiasa menjadi penyemangat dan motivasi dalam hidup ini;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah beserta jajarannya, Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Aparatur, Kepala Seksi Mutasi, Kepangkatan dan Jahatan pada BKPSDM serta Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Aceh Tengah yang telah bersedia memberikan data dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Kelas Aceh Tengah.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini masih membutuhkan kritik dan saran yang berharga dari semua kalangan. Akhirnya, dengan senantiasa mengharap ridha dan rahmat Allah SWT, akhir kata semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini membawa berkah bagi pengembangan ilmu pengetahuan. *Amin ya rabbal alamin.*

Takengon, Mei 2018

Penulis,

Hari Prawira
Nim. 501482917

RIWAYAT HIDUP

- Nama** : Hari Prawira
- NIM** : 501482917
- Program Studi** : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
- Tempat/Tanggal Lahir** : Aceh Tengah / 06 Februari 1987
- Riwayat Pendidikan** :
- Lulus MIN 1 Takengon pada tahun 1999
 - Lulus MTSN 1 Takengon pada tahun 2002
 - Lulus SMU Negeri 1 Pegasing pada tahun 2005
 - Lulus D-IV IPDN pada tahun 2009
- Riwayat Pekerjaan** :
- Tahun 2009 s/d 2010 sebagai staf Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
 - Tahun 2010 s/d 2011 sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kantor Camat Linge Kabupaten Aceh Tengah
 - Tahun 2011 s/d 2013 sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Camat Linge Kabupaten Aceh Tengah
 - Tahun 2013 s/d 2017 sebagai Kepala Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Tengah
 - Tahun 2017 s/d 2017 sebagai Kepala Seksi Perizinan, Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Camat Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah
 - Tahun 2017 s/d 2017 sebagai Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah
 - Tahun 2017 s/d sekarang sebagai Kepala Seksi Pengembangan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Takengon, Mei 2018

Penulis,

Hari Prawira
NIM. 501482917

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrac	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Analisis Penempatan Guru	9
B. Manajemen Sumber Daya Guru	11
C. Pendidikan.....	12
D. Pendidikan Sekolah Dasar.....	16
E. Aparatur Sipil Negara.....	25
F. Guru.....	34
G. Penelitian Terdahulu	43
H. Kerangka Berpikir	46
I. Operasionalisasi Konsep	42
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	49
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	49
C. Instrumen Penelitian.....	50
D. Prosedur Pengumpulan Data	51
E. Metode Analisis Data	53
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	55
B. Hasil	60
C. Pembahasan	71

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95



DAFTAR BAGAN

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	47
2. Peta wilayah Aceh Tengah	56
3. Grafik Pertambahan Siswa SD di Kabupaten Aceh Tengah	81



DAFTAR TABEL

Tabel.	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	44
2. Operasional Konsep	48
3. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah	55
4. Banyak Penduduk dan Sekolah Dasar Negeri per Kecamatan	58
5. Kebutuhan dan ketersediaan guru PNS Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Tengah	60
6. Rataan rasio penempatan satuan pendidikan di sekolah dasar negeri	62
7. Kondisi Guru Kelas PNS di SD Negeri	64
8. Kondisi Guru mata pelajaran Penjaskes di SD Negeri	65
9. Kondisi Guru PNS mata pelajaran Pendidikan Agama Islam	66
10. Jumlah Guru PNS yang dan akan dipindahkan pada tahun 2012-2018 ..	67
11. Beberapa SDN tanpa guru PNS di Kabupaten Aceh Tengah	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	100
2. Pedoman Observasi	106
3. Pedoman Studi Dokumentasi	107
4. Dokumentasi Kegiatan Wawancara	108
5. Dokumentasi Kegiatan Observasi	109
6. Dokumentasi Kegiatan Telaah Dokumen	110
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	125



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan jelas menegaskan bahwa tujuan pemerintah Indonesia selanjutnya menjadi tujuan nasional adalah melindungi segenap kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai delapan tujuan. Pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis

pendidikan secara profesional. Keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kelima, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya. Kedelapan, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama dan saling berkaitan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan khusus untuk masing-masing komponen agar setiap komponen dapat bekerja dengan baik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan yaitu pendidik atau guru.

Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha yang bertujuan untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan. Di samping itu pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat berusaha menyelenggarakan pendidikan. Salah satu diantaranya adalah penyelenggara pendidikan sekolah dasar (SD). SD merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun. Keberadaannya sangat urgen bagi kepentingan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), sebab pada tahap pendidikan dasar ini seorang anak diajarkan untuk menguasai berbagai kemampuan dasar sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dilihat bangunan dan sarana fisiknya, pengadaan lembaga pendidikan SD bukanlah hal yang sulit. Namun lembaga pendidikan ini tidak hanya terdiri dari bangunan dan seperangkat sarana fisik saja, melainkan hal yang paling vital di lembaga pendidikan ini ialah pengadaan tenaga pendidik. Tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting, menurut Brandt (Editor Jalal dan Supriadi 2001:262):

“guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan dan mereka yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaruan kurikulum,

pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya berarti apabila melibatkan guru.”

Pada Sekolah Dasar (SD) terdapat tiga jenis guru, yaitu guru kelas, guru agama, dan guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Jumlah kebutuhan guru kelas ditentukan oleh jumlah rombongan belajar (Rombel). Jumlah kebutuhan guru agama dan guru penjas ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar dan alokasi jam tatap muka perminggu.

Jumlah guru sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pendidikan khususnya di sekolah. Untuk menyediakan tenaga pengajar (guru) SD, selain didasarkan berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan diatas, harus juga didasarkan dengan keuangan pemerintah daerah. Jumlah guru yang kurang dapat menghambat pelaksanaan pendidikan. Sedangkan guru yang terlalu banyak maka akan dapat mengakibatkan kekurangan jumlah beban jam mengajar guru.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah dataran tinggi, yang mana sebahagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Ibukota kabupaten Aceh Tengah, Kota Takengon dan kabupaten ini terdiri dari 14 kecamatan. Sebanyak tiga kecamatan berada di ibukota kabupaten Aceh Tengah yaitu Kecamatan Lut Tawar, Bebesen dan Kebayakan; empat kecamatan berada dipinggiran ibukota yang minimal membutuhkan waktu 15 menit sampai 45 menit yaitu kecamatan Bies, Pegasing, Silih Nara dan Kute Panang; dan selebihnya merupakan kecamatan yang berada didaerah.

Dari data pra penelitian, terjadi penumpukan jumlah guru SD di daerah ibukota dan kurangnya ketersediaan guru di daerah pinggiran kota dan

daerah terpencil. Jumlah kebutuhan guru PNS di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Tengah Oktober 2017 berjumlah 1.446 orang, dengan ketersediaan guru PNS berjumlah 1.095 orang. Terjadi kekurangan sebanyak 351 orang guru PNS di Kabupaten Aceh Tengah, dan tertinggi ada di kecamatan Linge dengan total kekurangan sebanyak 98 orang.

Namun demikian, ada empat kecamatan yang memiliki kelebihan guru PNS yaitu kecamatan Lut Tawar, Bebesen, Kebayakan dan kecamatan Bies dengan jumlah 75 orang PNS. Ke empat kecamatan ini berada di kawasan ibu kota kabupaten. Jumlah kekurangan guru semakin bertambah karena ketidakrataan penyebaran guru PNS menjadi 426 orang di 10 kecamatan.

Banyaknya kebutuhan guru menimbulkan permasalahan yakni ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan guru di SD. Ketersediaan guru PNS di SD tiap tahun akan berkurang karena adanya masa pensiun. Oleh karena itu, jumlah kebutuhan guru menjadi lebih banyak dari jumlah ketersediaan guru. Kondisi seperti ini disebut dengan kekurangan guru PNS.

Kekurangan guru PNS dapat diatasi dengan pengangkatan CPNS, tetapi Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat dengan mudah melaksanakannya disebabkan karena ketentuan atau syarat agar pemerintah daerah dapat melakukan pengangkatan CPNS adalah anggaran yang dikeluarkan untuk belanja pegawai tidak boleh lebih dari 50% dari jumlah APBD. Sedangkan Kabupaten Aceh Tengah sudah lebih dari 65% dari APBD untuk belanja pegawai. Oleh karena itu, Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan

moratorium atau penundaan pengangkatan CPNS. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan “Analisis Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Aceh Tengah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dan masalah-masalah yang telah digambarkan di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penempatan guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tengah?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, agar penelitian lebih fokus maka penelitian ini dibatasi pada pemerataan penyebaran guru dalam Kabupaten Aceh Tengah. Guru tersebut yaitu guru kelas, guru Agama, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis bagaimana penempatan guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Menganalisis kendala dalam pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta sumbangan pengembangan ilmu manajemen pendidikan yakni berkaitan dengan perencanaan pendidikan, khususnya mutasi atau penempatan guru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat informasi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan dan pemerataan guru sekolah dasar serta mengatasi kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Tengah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Penempatan Guru

Pemerintah telah mengatur tentang pengangkatan dan penempatan pada satuan pendidikan dalam PP 74 Tahun 2008 pasal 58 disebutkan bahwa:

1. Pengangkatan dan penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Perencanaan kebutuhan guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan atau masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan guru di daerah khusus.

Sementara itu, letak atau penyebaran sekolah dalam konteks ruang perkotaan dapat diidentifikasi dengan melakukan analisis keruangan. Menurut Bintarto (1983 : 75-76), pada hakekatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitikberatkan kepada 3 unsur geografi yaitu jarak (*distance*), kaitan (*interaction*) dan gerakan (*movement*).

Pemerintah sudah mengatur tentang otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia merumuskan peraturan tentang Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah. Dalam Pasal 12 ayat 1

disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dengan Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah. Dengan adanya perubahan pola pengaturan penyelenggaraan pendidikan dari yang sepenuhnya diatur secara sentralistik oleh Pemerintah Daerah, maka saatnya setiap daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi dibidang pendidikan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 disebutkan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola kepegawaian di daerah. Selanjutnya pada lampiran I bagian A dalam Undang-undang diuraikan maksud dari kewenangan pemindehan pendidik dalam daerah/kabupaten kota.

Berkaitan dengan masalah kebutuhan dan sebaran kepegawaian, dalam pasal 41 ayat (2) Undang-Undang republik Indonesia No. 20 tahun 2003 telah dinyatakan pula bahwa:

”Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan di atur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah berkoordinasi dalam melakukan hak dan kewajiban untuk masalah pengangkatan serta penempatan guru, hal ini terkait dengan merata atau tidaknya persebaran guru. Sudah seharusnya seorang guru dapat menempatkan dirinya sesuai dengan tugas dan peranannya sebagai seorang guru, sehingga dengan

penempatan diri yang tepat maka proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan dan pemerataan guru, sebagaimana menurut Amatebun (1973) sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan kebutuhan guru bidang studi yang nyata,
- (2) Sedapat mungkin tetap mempertahankan guru yang ada dengan kualitas yang baik,
- (3) Guru yang akan dimutasikan ke tempat lain tidak menimbulkan masalah atau kesulitan di tempat yang baru.
- (4) Mutasi ke daerah terpencil sulit, oleh sebab itu perlu mendapat perhatian khusus.

Masalah yang sering muncul akibat dari otonomi daerah tersebut adalah tidak meratanya sebaran guru akibat dari kurangnya tenaga pengajar yang mau ditempatkan pada daerah-daerah terpencil. Dengan tidak meratanya sebaran guru banyak menimbulkan kesenjangan pendidikan. Sebaran guru yang tidak merata juga akan membuat pembelajaran yang dilaksanakan menjadi tidak ideal. Akibat dari kurangnya sebaran guru tersebut akan membuat seorang guru harus mengambil jam mengajar yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Setiap lembaga pendidikan membutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini guru dengan jumlah yang berbeda-beda dan tidak selalu sama meskipun lembaga tersebut berada dalam jenjang dan jenis pendidikan yang sama. Untuk dapat mengetahui berapa kebutuhan guru dalam suatu lembaga pendidikan maka diperlukan kegiatan analisis kebutuhan guru. Hal ini seperti yang diungkapkan Sunandar (2006:5) yang menyebutkan “melalui analisis kebutuhan dapat teridentifikasi kebutuhan pendidikan nyata di lapangan dan sekaligus dapat diketahui urutan prioritas dari kebutuhan- kebutuhan tersebut”.

Kebutuhan pada mulanya merupakan konsep yang sering digunakan dalam ilmu ekonomi dan telah banyak dikembangkan untuk berbagai keperluan dalam kegiatan manusia yang berbeda. Dalam ilmu ekonomi kebutuhan disebut “*demand*”. Kebutuhan ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan ada untuk memenuhi apa yang diperlukan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi kondisi ketidakseimbangan atau kesenjangan. Sedangkan Danny Meirawan (Sunandar, 2006:5) menyebutkan bahwa kebutuhan adalah istilah dalam perencanaan yang memperlihatkan adanya *gap* (kesenjangan) antara hasil yang dicapai sampai saat sekarang dengan hasil yang diinginkan. Untuk memperbaiki hasil yang diperoleh sekarang sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik, maka diperlukan adanya suatu tambahan, tambahan itulah yang dimaksud dengan kebutuhan.

Kebutuhan dalam pendidikan bukan dipandang sebagai *gap* atau kesenjangan tetapi apa yang harus terpenuhi dalam menjalankan pendidikan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunandar, (2006:6) yang menyebutkan :

Dalam konteks pendidikan kebutuhan merupakan kondisi yang menuntut terpenuhinya sesuatu hal untuk menjalankan proses pendidikan dengan baik. Seperti halnya ketersediaan guru, fasilitas pembelajaran, kurikulum dan lain sebagainya. Kebutuhan tenaga guru mengandung makna sejumlah orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu pada lembaga tertentu dan pada periode tertentu.

Hal yang sama disampaikan oleh Gaffar (1987: 77) yang menyebutkan bahwa “kebutuhan tenaga guru (*teacher demand*) adalah tuntutan pemakaian jasa profesional guru untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak didik pada lembaga pendidikan pemakai jasa guru itu”.

Menurut Sunandar (2006:8) bahwa “kebutuhan guru sangat berkaitan dengan pertumbuhan jumlah murid, kurikulum, keadaan guru, kebijakan baru dan

sebagainya. Laju pertumbuhan murid dan populasi usia melanjutkan merupakan yang dominan dalam perhitungan kebutuhan guru dimasa yang akan datang”.

Adanya perubahan kebutuhan guru yang disebabkan berbagai faktor ini menuntut adanya analisis kebutuhan yang dilakukan dengan baik dan tidak asal-asalan. Hal ini karena analisis kebutuhan merupakan langkah yang penting agar perencanaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan atau keadaan sesungguhnya. Bila analisis dan perencanaan hanya dilakukan asal-asalan maka keputusan yang diambil terkait dengan pengangkatan guru tidak berguna dan tidak mampu mengubah ke keadaan yang diharapkan.

Dalam konteks pendidikan kebutuhan merupakan kondisi yang menuntut terpenuhinya sesuatu hal untuk menjalankan proses pendidikan dengan baik. Seperti halnya ketersediaan guru, fasilitas pembelajaran, kurikulum dan lain sebagainya. Pemenuhan guru di setiap daerah merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk sebaran dan kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV pasal 24 ayat (1) yaitu: “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara baik untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah”.

Untuk melaksanakan perhitungan kebutuhan guru agar hasilnya mampu menggambarkan jumlah guru ideal yang dibutuhkan maka diperlukan rumus untuk menghitung. Rumus perhitungan kebutuhan guru SD menurut Petunjuk

Teknis Peraturan Bersama Lima Menteri No 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Rumus perhitungan jumlah kebutuhan guru kelas:

$$KGK = \Sigma K \times 1 \text{ Guru}$$

2. Rumus perhitungan jumlah guru agama dan penjaskes:

$$KGAP = \frac{JTM}{24} = \sum_{i=1}^7 (MP_i \times \Sigma K_i)$$

Keterangan :

KGK	: Kebutuhan Guru Kelas
JTM	: Jumlah Jam Tatap Muka Perminggu
ΣK	: Jumlah Kelas
KGAP/P	: Kebutuhan Guru Agama/ Penjaskes
MP	: Alokasi Jam Mata Pelajaran Perminggu pada Mata Pelajaran Agama/ Penjaskes di Satu Tingkat
24	: Jam wajib mengajar perminggu
1, 2, 3, 4, 5 dan 6	: Tingkat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6

Rumus diatas digunakan untuk menghitung kebutuhan guru total. Langkah lanjutan dari perhitungan diatas yaitu menghitung kekurangan guru. Hal ini dilakukan karena ketersediaan guru bukanlah sesuatu yang tetap.

Asumsi dalam memperkirakan beban mengajar guru dan besar kelas dalam penelitian ini didasarkan pada Petunjuk Teknis Peraturan Bersama Lima Menteri No 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Menurut Petunjuk Teknis Peraturan Bersama Lima Menteri No 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan kebutuhan guru sekolah dasar yaitu sebagai berikut:

1. Setiap rombel 20- 32 siswa
2. Setiap rombel diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas.
3. Setiap SD harus menyediakan guru agama dan guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Kesehatan .
4. Wajib mengajar bagi guru agama dan guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Kesehatan (penjaskes) yang digunakan dalam Penghitungan 24 jam tatap muka perminggu.
5. Setiap SD harus menyediakan guru agama sesuai dengan ragam jenis agama yang dianut peserta didik.
6. Apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan/atau SD tersebut menyelenggarakan program pendidikan inklusi, maka SD tersebut harus menyediakan minimal satu guru pendidikan khusus per enam rombel, dengan perhitungan jam setara dengan guru kelas.

Berdasarkan petunjuk teknis diatas, asumsi beban studi siswa tidak diterapkan pada perhitungan guru kelas karena satu rombel harus diampu satu guru kelas. Asumsi beban studi murid berlaku untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan serta Pendidikan Agama Islam. Asumsi beban studi murid untuk kedua mata pelajaran tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah. Behan studi siswa perminggu untuk kedua mata pelajaran yakni tingkat I sampai VI sebesar 4 jam per minggu. Alokasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan estimasi jumlah guru yang akan pensiun didasarkan pada jumlah guru yang akan memasuki batas usia pensiun yakni 60 tahun. Batas usia ini didasarkan pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Hasil proyeksi siswa dapat digunakan untuk memproyeksikan jumlah SD Negeri dan rombel yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Untuk menghitung proyeksi jumlah SD Negeri dilakukan dengan asumsi satu SD Negeri terdiri dari 6 rombel atau rasio sekolah dengan rombel adalah 1:6 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah siswa setiap rombelnya didasarkan pada jumlah minimal siswa per rombel menurut Petunjuk Teknis Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Menurut petunjuk teknis ini jumlah siswa dalam satu rombel adalah 20-32 siswa. Perhitungan rombel dilakukan dengan jumlah siswa per rombel adalah 20 siswa karena didasarkan pada standar minimal. Oleh karena itu dapat diasumsikan satu SD Negeri minimal terdiri dari 120 siswa.

Menurut Hamalik (2002:12) masalah yang dihadapi di dunia pendidikan saat ini yakni:

1. Kekurangan jumlah guru dalam tiap jenjang persekolahan dan per bidang studi. Jumlah guru yang dibutuhkan tidak seimbang dengan persediaan jumlah guru dibandingkan dengan proyeksi tambahan murid.

2. Masalah mutu, bahwa kualifikasi guru yang diminta oleh sekolah tidak cocok dengan kualifikasi yang telah tersedia dilihat dari kebutuhan bidang studi.
3. Penyebaran guru tidak seimbang dengan permintaan daerah-daerah yang tersebar luas dengan sebagian besar guru ingin bekerja di kota-kota saja.
4. Faktor waktu, bahwa terdapat *time lag* antara jangka waktu pendidikan *pre-service* dengan saat dimana para lulusan diperlukan.
5. Karena kurangnya guru, maka pada umumnya guru mengajar melebihi beban resmi, dimana akan berpengaruh pada hasil pendidikan.
6. Kenyataan yang terlihat selama ini dan masih juga tergambarakan ialah lembaga-lembaga penataran masih bermacam ragam, belum dipusatkan pada satu lembaga tertentu.

Berkaitan dengan masalah kebutuhan dan sebaran kepegawaian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 41 ayat 2 telah dinyatakan bahwa: “pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.” Berdasarkan uraian tersebut, maka sangatlah jelas bahwa diperlukannya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan untuk masalah serta penempatan guru, terkait dengan merata atau tidaknya persebaran guru.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2013) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu, Menurut Sutrisno (2013), Manajemen sumber daya

manusia manajemen sumber daya adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Donald yang dikutip oleh Jay (2008), menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses di mana suatu organisasi bisa memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki sejumlah karyawan yang tepat, tipe yang tepat, dan pada saat yang tepat, untuk melakukan tugas-tugas secara ekonomis. Jay (2008) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia meliputi beberapa tahapan/proses sebagai berikut: (1) proses penjarangan (rekrutmen), (2) proses seleksi, (3) proses penempatan, (4) penilaian kinerja, dan (5) pengembangan karir guru.

i. Penjarangan (Rekrutmen)

Penjarangan atau rekrutmen, adalah sebuah usaha aktif dalam mencari calon potensial dengan mempengaruhi mereka agar bersedia mengisi posisi-posisi yang ada dalam sebuah lembaga operasional sekolah (Gordon dalam Jay, 2008). Sementara itu, menurut Jones dan Walters, rekrutmen adalah aktivitas-aktivitas yang terencana dalam menarik sejumlah individu yang berkualitas yang dibutuhkan untuk mengemban tugas-tugas yang ada di sebuah lembaga operasional sekolah (Jay, 2008).

Rekrutmen atau Penerimaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk kegiatan tersebut diperlukan kegiatan penarikan. Menurut T. Hani Handoko mengemukakan bahwa “ Penarikan (rekrutmen) adalah proses pencarian dan pemikatan

para calon karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai karyawan (Handoko, 2001).

Dalam rangka mendapatkan calon guru yang professional, memenuhi kualifikasi, dan menjanjikan untuk menduduki posisi tertentu tidaklah mudah. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam perencanaan atau pelaksanaan rekrutmen guru, diantaranya:

- a. Rekrutmen guru harus dirancang secara matang agar dapat memenuhi kebutuhan.
- b. Rekrutmen guru harus dilakukan secara objektif. Artinya panitia seleksi pegawai baru menetapkan pelamar yang lulus dan pelamar yang tidak lulus secara objektif. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan secara objektif dinilai tidak lulus, dan sebaliknya pelamar yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai pelamar yang lulus.
- c. Agar didapatkan calon yang professional, sebaiknya materi seleksi pegawai baru harus komprehensif mencakup semua aspek persyaratan yang harus dimiliki oleh calon guru.

(Bafadal, 2008).

Bafadal (2008) menambahkan bahwa Proses rekrutmen guru bisa dilakukan melalui empat kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. **Persiapan rekrutmen guru**

Kegiatan pertama, dalam proses rekrutmen guru baru, adalah melakukan persiapan rekrutmen guru baru. Persiapan rekrutmen guru baru harus matang sehingga melalui rekrutmen tersebut sekolah bisa

memperoleh guru yang baik. Kegiatan persiapan rekrutmen guru baru ini meliputi:

- 1) Pembentukan panitia rekrutmen guru baru.
 - 2) Pengkajian berbagai undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan yayasan yang berkenaan dengan peraturan penerimaan guru, walaupun akhir-akhir ini telah diberlakukan otonomi daerah.
 - 3) Penetapan persyaratan-persyaratan untuk melamar menjadi guru baru.
 - 4) Penetapan prosedur pendaftaran guru baru.
 - 5) Penetapan jadwal rekrutmen guru baru.
 - 6) Penyiapan fasilitas yang diperlukan dalam proses rekrutmen guru baru, seperti media pengumuman penerimaan guru baru, format rekapitulasi pelamar, dan format rekapitulasi pelamar yang diterima.
 - 7) Penyiapan ruang atau tempat memasukan lamaran guru baru.
 - 8) Penyiapan bahan ujian seleksi, pedoman pemeriksaan hasil ujian dan tempat ujian.
- b. Penyebaran pengumuman penerimaan guru baru

Begitu persiapan telah selesai dilakukan, maka kegiatan berikutnya penyebaran pengumuman dengan melalui media yang ada seperti brosur, siaran radio, surat kabar dan sebagainya. Sudah barang tentu yang digunakan sebaiknya media yang dapat dengan mudah dibaca dan didengar oleh masyarakat. Pengumuman penerimaan guru baru

yang baik berisi tentang waktu, tempat, persyaratan, dan prosedur mengajukan lamaran.

c. **Penerimaan lamaran guru baru**

Begitu pengumuman Penerimaan lamaran guru baru telah disebarkan tentu masyarakat mengetahui bahwa dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana tercantum dalam pengumuman, ada penerimaan guru baru disekolah. Mengetahui ada penerimaan guru baru itu, lalu masyarakat yang berminat memasukkan lamarannya. Panitia pun mulai menerima lamaran tersebut.

Kegiatan yang harus dilakukan panitia meliputi:

- 1) Melayani masyarakat yang memasukkan lamaran kerja.
- 2) Mengecek semua kelengkapan yang harus disertakan bersama surat lamaran.
- 3) Mengecek semua isian yang terdapat didalam surat lamaran, seperti nama pelamar, alamat pelamar.
- 4) Merekap semua pelamar dalam format rekapitulasi pelamar.

Untuk melamar, seseorang diharuskan mengajukan surat lamaran. Surat lamaran tersebut harus dilengkapi dengan berbagai surat keterangan, seperti ijazah, surat keterangan kelahiran yang menunjukkan umur pelamar, surat keterangan warga Negara Indonesia (WNI), surat keterangan kesehatan dari Dokter, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian.

d. **Seleksi pelamar**

Setelah pendaftaran atau pelamaran guru baru ditutup, kegiatan berikutnya adalah seleksi atau penyaringan terhadap semua pelamar. seleksi merupakan suatu proses pembuatan perkiraan mengenai pelamar yang mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil dalam pekerjaannya setelah diangkat menjadi guru. Ada lima teknik dalam hal ini yaitu inventaris biografis, wawancara, pemeriksaan badan, teknik tes, dan penilaian oleh pusat penilaian

2. Penyaringan (Seleksi)

Tujuan dari proses seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja (calon-calon guru) yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi jabatan yang tersedia atau sesuai dengan kebutuhan organisasi (Martoyo, 2007). Seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi (Malthis dan Jackson, 2006). Seleksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan.

Dalam proses seleksi dibutuhkan sejumlah calon guru yang memiliki kompetensi yang tinggi, yang jelas sesuai dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, dan posisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Agar dapat melakukan seleksi secara fair dan obyektif, maka harus ditetapkan suatu

kriteria seleksi. Meskipun kriteria seleksi tidak ada yang sempurna, maka tetap perlu adanya rangkaian kriteria dalam proses seleksi, seperti: pihak-pihak mana saja yang harus dilibatkan, kriteria-kriteria apa saja yang relevan, kompetensi apa yang dibutuhkan, kualitas personal seperti apa yang diharapkan, dan kebijakan-kebijakan tertulis seperti apa yang dibutuhkan dalam pengangkatan karyawan (Jaedun, 2011).

3. Penempatan (Penugasan)

Tahap penempatan kerja (*job placement*) bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Menurut Jones (Jay, 2008), beberapa faktor yang mempengaruhi penempatan guru baru adalah: (1) posisi-posisi kerja yang tersedia, (2) kekosongan jabatan, (3) perubahan kualifikasi para guru, (4) perubahan program pendidikan, (5) perubahan jumlah siswa, (6) perubahan teknologi, dan (7) perubahan struktur organisasi.

Penempatan adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemimpin suatu instansi atau bagian personalia untuk menentukan seseorang pegawai masih tetap atau tidak ditempatkan pada suatu posisi atau jabatan tertentu menurut pertimbangan keahlian atau keterampilan yang dimiliki (Wendell L.French dalam Sulistiyani, 2003)

4. Penilaian (Evaluasi) Kinerja

Penilaian prestasi kerja atau penilaian kinerja adalah suatu proses evaluasi atau penilaian prestasi kerja atau kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi terhadap karyawannya (Martoyo, 2007). Sedangkan

Evaluasi atau disebut juga pengendalian merupakan kegiatan sistem pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan dalam kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi, dan memberikan ganjaran (Hamalik, 2008).

Dengan adanya penilaian kinerja, diharapkan akan menjadi motivasi bagi semua karyawan yang bekerja di sebuah organisasi, yaitu untuk selalu meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, karena apa yang dikerjakan oleh semua karyawan akan selalu dilakukan penilaian oleh atasannya. Menurut Bernadin dan Russell dalam Sulistiyani (2003), menjelaskan kinerja merupakan catatan out-come yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu. Sedangkan kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan.

Menurut Hani Handoko (Martoyo, 2007), penilaian kinerja yang dilakukan terhadap prestasi kerja atau kinerja karyawan memiliki beberapa manfaat, antara lain untuk kepentingan: perbaikan prestasi kerja, penyesuaian-penyesuaian kompensasi, membuat keputusan-keputusan kompensasi, kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir karyawan, kesalahankesalahan proses staffing, ketidak-akuratan informasi, kesalahan-kesalahan penempatan, kesalahan penugasan, dan karena adanya tantangan-tantangan eksternal.

5. Pengembangan Karir Guru

Pengembangan karir pada dasarnya berorientasi pada perkembangan organisasi/ perusahaan dalam menjawab tantangan bisnis di masa mendatang. Setiap organisasi/ perusahaan harus menerima kenyataan, bahwa eksistensinya di masa depan tergantung pada SDM (Nawawi, 2006). Menurut Samsudin (2006:133) mendefinisikan pengembangan karir adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Menurut Hunter (1986) (yang dikutip Jay, 2008), para siswa akan mampu belajar lebih baik dari guru-guru dan staf-staf manajemen yang mereka sendiri juga belajar, berpikir dan berkembang. Untuk mewujudkan kondisi tersebut perlu sebuah langkah yang tepat untuk merancang dan melaksanakan program peningkatan mutu guru. Tujuan dari pengembangan karir karyawan (guru) adalah untuk membantu guru agar mampu berprestasi yang lebih baik di dalam pekerjaannya, dan untuk memberikan tanggung jawab serta tugas-tugas baru kepada mereka (Jay, 2008).

UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru sebagai tenaga profesional harus memenuhi sejumlah persyaratan yakni (1) memiliki kualifikasi akademik, (2) memiliki kompetensi, (3) memiliki sertifikat pendidik, (4) sehat jasmani dan rohani (5) memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen

sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Hal ini senada dengan Sarimaya (2008) menegaskan bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Selain kualifikasi akademik, seorang guru profesional juga harus memiliki kompetensi yang terdiri dari kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial.

Sejak muncul dan diberlakukannya UU tentang Guru dan Dosen, seluruh guru wajib memiliki kualifikasi akademik ijazah atau tamatan pendidikan S-1. Seperti apa yang tertuang dalam pasal 9 bahwa kualifikasi akademik yang dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-IV). Kualifikasi akademik untuk guru sekolah dasar SD/MI, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana pendidikan dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi (Sarimaya, 2008). Ketentuan ini dibuat agar dapat meningkatkan kualitas guru secara personal, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan kesejahteraan guru dan sebagai upaya pemerintah dalam perbaikan sistem pendidikan ke arah yang lebih baik.

Sarimaya (2008) menambahkan bahwa peningkatan kualifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sehingga layak dikatakan sebagai guru profesional. Selain itu adalah agar guru tersebut dapat mengikuti uji sertifikasi pada saat telah memperoleh ijazah S-1. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional dapat dibuktikan dengan

sebuah sertifikat atau sering disebut sertifikat pendidik. Dalam UU tentang Guru dan Dosen pasal 1 butir 12, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat dan diperoleh melalui proses yang disebut sertifikasi. Seorang guru yang sudah memenuhi kualifikasi, memiliki sertifikat pendidik dan berhasil lolos dalam uji sertifikasi maka guru tersebut berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

C. Pendidikan

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti halnya Saroni (2011: 10) yang menyatakan bahwa, "pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk survive yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan."

Tilaar (2002: 435) menyatakan bahwa "hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya". Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan

pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

Todaro & Smith (2003: 404) menyatakan bahwa “pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.” Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi”. Indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, yaitu terdiri dari:

1. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.

3. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

Pengertian pendidikan dasar dalam UU 50 yang disebut dengan pendidikan rendah, definisinya sangat jelas, bahwa level ini adalah level untuk menumbuhkan minat, mengasah kemampuan pikir, olah tubuh dan naluri. Berdasarkan pasal 17 UU RI No. 20 tahun 2003 menerangkan bahwa:

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

D. Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang disekolah secara teratur, sistematis, bertingkat dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Salah satu tingkat pendidikan sekolah adalah Sekolah Dasar (Hasbullah, 2005).

Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, ditempuh dalam waktu enam tahun, mulai dari kelas satu sampai kelas enam dan merupakan suatu lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktivitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum (Ahmadi, 2001).

Tujuan pendidikan sekolah dasar menurut Suharjo (2006: 8) yaitu:

1. Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa.
2. Meberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa.
3. Membentuk warga negara yang baik
4. Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP
5. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar bekerja di masyarakat.
6. Terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Suharjo (2006) menambahkan bahwa “sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun.” Hal senada juga diungkapkan Ihsan (2008) bahwa “sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 tahun.”

E. Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pengertian mengenai ASN itu sendiri tertuang pada pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jenis Aparatur Sipil Negara

Jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan PP RI No. 11 Tahun 2017 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

3. Status Aparatur Sipil Negara

Status Aparatur Sipil Negara diatur pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

4. Hak Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 tentang Hak-hak pegawai negeri sipil (PNS) adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS) dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan diperoleh, antara lain:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiunan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK berhak memperoleh:

- a. Gaji dan tunjangan;
- b. Cuti;
- c. Perlindungan; dan
- d. Pengembangan kompetensi.

5. Kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara adalah:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia;
- h. Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kedudukan Aparatur Sipil Negara:

- a. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara.
- b. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.
- c. Pegawai ASN barus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

7. Fungsi Aparatur Sipil Negara:

- a. Pelaksana kebijakan publik;

- b. Pelayan publik; dan
- c. Perekat dan pemersatu bangsa.

8. Tugas Aparatur Sipil Negara:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
- b. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas;
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, netral, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

F. Guru

1. Pengertian Guru

Dalam kegiatan pembelajaran tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Sagala (2013 : 147) Guru sebagai tenaga pendidik adalah seorang atau sekelompok orang yang berprofesi mengelola kegiatan belajar dan mengajar serta seperangkat peran lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif, melalui transformasi.

Menurut Mulyasa (2009), Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, di intifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, mandiri, dan disiplin. Guru juga harus mampu mengambil

keputusan secara mandiri (independen), terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik, dan lingkungan. Guru harus mampu bertindak dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran, terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran dan peserta didik, tidak menunggu perintah atasan atau kepala sekolah.

Gaffar (2007: 2) menyatakan guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oleh sebab itu, kedudukan guru difahami demikian penting sebagai ujung tombak dalam pendidikan, karena merupakan salah satu faktor penting yang menentukan berjalannya proses pembelajaran dan tercapainya keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Hadari Nawawi dalam Nurfuadi (2012: 54) menjelaskan bahwa pengertian guru dapat dilihat dari dua sisi. Pertama secara sempit, guru adalah ia yang berkewajiban mewujudkan program kelas, yakni orang yang kerjanya mengajar dan memberikan pelajaran di kelas. Sedangkan secara luas diartikan guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaan masing-masing.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa guru merupakan seorang pendidik dalam lembaga pendidikan formal di sekolah yang mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari

proses pendidikan. Oleh karena itu, guru harus mempunyai kualifikasi kompetensi mengajar dan dapat melakukan tugasnya secara profesional.

2. Jenis Pendidik/ Guru

Sekolah bukan hanya terkait dengan bangunan saja, tetapi juga terkait dengan guru sebagai pihak yang menyampaikan ilmu, pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Sunandar (2006:2) menyebutkan:

Guru merupakan salah satu unsur stakeholder pendidikan yang memainkan peranan di garis terdepan dalam institusi pendidikan dan dalam pengajaran yang berlangsung di sekolah. Sebagai seorang pendidik, guru menghadapi pengalaman langsung yang bervariasi dalam sistem pendidikan dengan berbagai pengaruh dan dampaknya. Selain itu, guru merupakan seseorang yang secara langsung berhubungan dengan murid, orang tua, birokrasi pendidikan dan masyarakat secara umum.

Pendidik berada di garis terdepan pendidikan dan menghadapi pengalaman langsung sehingga harus memiliki kesiapan dan bekal yang cukup. Menurut Pidarta (Maunah, 2009: 7-8) “pendidik adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru atau dosen. Kedua jenis pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu relatif lama agar mereka menguasai ilmu dan terampil melaksanakannya di lapangan”. Maunah (2009: 8) menyebutkan “pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan si terdidik baik jasmani maupun rohani agar mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu dan sosial”.

Dari pengertian pendidik atau guru di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendidik agar peserta didik memiliki kepribadian dan kemampuan baik jasmani maupun rohani

sehingga mandiri dan mampu menjalankan tugasnya. Guru juga merupakan seseorang yang secara langsung berhubungan dengan murid, orang tua, birokrasi pendidikan dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, guru perlu mendapat pendidikan agar memiliki bekal kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya.

Guru atau pendidik terdiri dari beberapa jenis. Menurut Juknis Peraturan Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, jenis guru digolongkan dalam tiga jenis yakni sebagai berikut:

- a. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB dan SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
- b. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/SDLB, SMP/SMPLB) termasuk guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Kesehatan, dan guru pendidikan gamma serta pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMK). Guru mata pelajaran pada SMK dikelompokkan menjadi guru normatif/adaptif dan guru produktif. Jenis guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap provinsi/kabupaten/kota.

Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan

formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA/SMALB dan SMK).

3. Tugas Guru

Menurut N.A Ametembun (Djamarah, 2000: 32), bahwa: “Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik disekolah maupun diluar sekolah.”. Usman (2007) dalam Wibowo (2015) menambahkan Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apa bila kita kelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para siswanya, tugas dan peran guru tidaklah terbatas didalam masyarakat, bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategi yang memilih peran yang penting dalam bentuk gerak maju kehidupan bangsa.

Dilihat dari segi penugasannya, tenaga pendidik (guru) di sekolah dasar terdiri atas dua fungsi yaitu sebagai guru kelas dan sebagai guru bidang studi.

a. Guru Kelas

Guru Sekolah Dasar (SD) adalah guru kelas artinya guru harus dapat mengajarkan berbagai materi pelajaran. Guru tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan bahan pelajaran yang telah ditetapkan, tetapi guru harus menguasai dan menghayati secara mendalam semua materi yang akan

diajarkan. Oleh karena itu, dalam memberikan materi pelajaran guru mempunyai peranan dan tugas sebagai pengelola proses belajar mengajar dikelas yang dituntut banyak inisiatif dan penuh kreativitas. Jadi penguasaan terhadap semua materi pelajaran mutlak dimiliki oleh seorang guru sekolah dasar (Zainal, 2002:85). Berdasarkan pendapat Akhmad Shunhaji, kepala sekolah SD Global Islamic School guru kelas adalah guru yang mempunyai fungsinya membantu kepala sekolah dengan memimpin kelas, mengatur kegiatan yang berhubungan dengan proses pendidikan dan pembelajaran, pengelolaan kelas dan administrasi kelas (Nurhayati, 2014, 143).

Nurhayati (2014) menambahkan bahwa Guru kelas mempunyai tugas-tugas diantaranya:

- a) Menciptakan iklim yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di sekolah atau dikelas.
- b) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya.
- c) Menyusun Program Pengajaran Individu (PPI) bersama-sama dengan guru pendidikan khusus.
- d) Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian kegiatan belajar-mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- e) Memberikan program perbaikan (remedial teaching), pengayaan atau percepatan bagi siswa yang membutuhkan
- f) Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Guru Bidang Studi

Dalam buku pertelaan tugas guru SD Global Islamic School dalam Nurhayati, (2014) disebutkan bahwa guru bidang studi adalah guru yang mengajar seluruh siswa disemua kelas paralel dengan pembagian jam pelajaran, dimana guru tersebut mengajarkan banya satu pelajaran. Di Sekolah Dasar, biasanya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama serta pelajara Pendidikan Jasmani dan Olahraga diajarkan oleh guru mata pelajaran, sedangkan mata pelajaran lain oleh guru kelas. Tetapi pada sekolah-sekolah besar dan tenaga gurunya cukup banyak, biasanya untuk kelas-kelas akhir (IV, V, dan VI) setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru mata pelajaran.

Nurhayati (2014) menambahkan, Tugas guru mata pelajaran (guru bidang studi) antara lain sebagai berikut :

- a) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman mengikuti pelajaran di kelas atau di sekolah.
- b) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kamampuan dan kebutuhannya.
- c) Menyusun Program Pengajaran Individu (PPI) bersama-sama dengan guru pendidikan khusus.
- d) Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian kegiatan belajar-mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- e) Memberikan program perbaikan (remedial teaching), pengayaan atau percepatan bagi siswa yang membutuhkan

- f) Menyusun program pengajaran selama kurun tertentu secara berkelanjutan.

4. Profesionalisme Guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pada Bab I Pasal 1 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut Webster dalam Kunandar (2011 : 45) profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Guru dipandang sebagai seorang profesional karena memiliki pengetahuan yang memang hanya dapat dikuasai dengan pendidikan tertentu, mampu secara mandiri mengambil keputusan, dan mempunyai prestasi tertentu dalam masyarakat (Bernadib dalam Sagala, 2013 : 10).

Profesionalisme itu sendiri dalam sudut pandang Nurfuadi (2012 : 10) merupakan sikap professional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi. Guru yang profesional ini yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari setiap pembelajaran yang dilakukan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam proses ini akan menghasilkan penyelenggaraan organisasi yang baik dengan pencapaian tujuan organisasi, hubungan kerja, cara kerja serta prosedur kerja yang tepat, dengan berpedoman kepada prinsip “penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat” atau “*the right man on the right place and right man behind the right job*”. Dalam prosesnya akan dilihat kompetensi seseorang melalui pengetahuan dan latar belakang pendidikan, keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, serta motivasi dengan tujuan agar didapat guru yang terampil, cerdas, produktif, kreatif dan inovatif. Aspek kompetensi menunjukkan bahwa perhatian organisasi lebih difokuskan kepada kompetensi SDM (Cherrington, 1994).

Menurut Bafadal (2006: 6) guru yang profesional adalah guru yang memiliki visi yang tepat dan berbagai aksi inovatif. Visi tanpa aksi adalah bagaikan sebuah impian, aksi tanpa visi adalah bagaikan perjalanan tanpa tujuan dan membuang-buang waktu saja. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar guru harus memperhatikan karakteristik peserta didik, karena reward bagi peserta didik merupakan sebuah motivasi. selain itu guru harus bisa membangun iklim positif dalam kegiatan belajar mengajar.

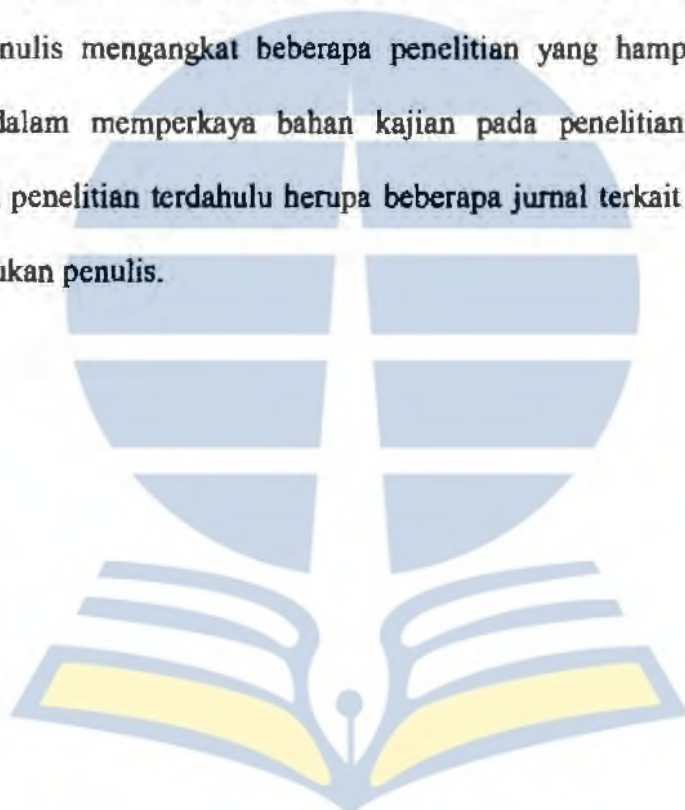
Persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki guru yang profesional meliputi persyaratan akademik, persyaratan administratif, persyaratan tertulis, persyaratan fisik dan psikis (Sardiman, 2006: 124). Sidi (2001: 38) menyebutkan persyaratan minimal sebagai guru profesional yaitu:

- b. Memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai
- c. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai bidang yang ditekuni

- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan peserta didik
- e. Memiliki jiwa kreatif dan produktif.
- f. Memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya
- g. Selalu mengembangkan diri secara terus menerus.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian yang hampir serupa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.



Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Yesse, M. dkk. (2010)	Distribusi Kebutuhan dan Ketercukupan Guru Bidang Studi Tingkat SMP Negeri Kabupaten Sleman Tahun 2010	Kebutuhan guru di Kabupaten Sleman terjadi kelebihan.
<p>Perbedaan: Metode Kuantitatif dan lokasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 dengan objek penelitian adalah guru SMP Negeri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2018 dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan objek penelitian adalah guru SD Negeri.</p>		
Novita Puspasari (2011)	Distribusi Kebutuhan dan Ketercukupan Guru Bidang Studi Dalam Rumpun IPS Tingkat SMA Se Kabupaten Sleman Tahun 2011	Jumlah guru bidang studi Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi di Kabupaten Sleman mengalami kelebihan guru, namun pendistribusian guru tersebut kurang merata untuk masing-masing bidang studi di setiap kecamatan. Jumlah guru bidang studi Sejarah di Kabupaten Sleman mengalami kekurangan guru sejumlah 46 guru. Peta tematik ketercukupan guru bidang studi sangat membantu dalam memberikan informasi ketercukupan guru bidang studi. Sebagian besar guru bidang studi dalam rumpun IPS tingkat SMA di Kabupaten Sleman kurang memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam per minggu.
<p>Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 dengan objek penelitian adalah guru SMA dengan rumpun IPS sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 dengan objek penelitian adalah guru SD Negeri.</p>		

<p>Wiwik Wijayanti dan Mada Sutapa (2015)</p>	<p>Penataan Dan Pemerataan Guru: Analisis Kebutuhan, Ketersediaan, Dan Kecukupan Guru Di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah</p>	<p>Kekurangan guru kelas PNS sebanyak 892 guru, sementara itu masih kekurangan guru PNS PAI sebanyak 176 guru dan guru penjas masih kurang 26 guru. Sedangkan kecukupan guru mata pelajaran (10 mapel) di SMP masih kekurangan 282 guru PNS. Namun jika dengan guru mobail maka kekurangan tersebut menjadi 184 orang guru. Jika ditinjau berdasarkan usia guru maka dapat diketahui total guru SD yang akan pensiun dalam 10 tahun yang akan datang sebanyak 1530 guru (43%). Guru SMP yang akan pensiun dalam 10 tahun yang akan datang sejumlah 222 guru.</p>
<p>Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 dengan objek penelitian adalah guru SD dan SMP, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, termasuk jenis penelitian analisis data sekunder (ADS). Data diperoleh dari SIMPK-DAPODIK, kemudian dianalisis dengan menggunakan software yang dikembangkan USAID PRIORITAS berupa pivottable dan pivotchart, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 dengan objek penelitian adalah guru SD Negeri.</p>		
<p>Ratnasari, D., Kustiawan dan Handrisal (2018)</p>	<p>Implementasi Pemerataan Guru PNS Di Kota Batam (Studi Kasus Pada Jenjang Sekolah Dasar)</p>	<p>Berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi dimensi ini adalah komunikasi dan disposisi, komunikasi ditemukan bahwa kurangnya sosialisasi kepada guru dan sekolah tentang pentingnya pemerataan guru, sehingga sekolah-sekolah yang kekurangan guru tidak tahu harus mengajukan ke siapa kekurangan tersebut, kemudian juga tidak didukung oleh aturan yang kuat seperti syarat pemerataan guru, pendanaan, dan lain sebagainya, tidak hanya itu faktor disposisi atau sikap pelaksana juga masih belum mendukung karena masih banyak kekurangan dari sekolah yang ada di Batam namun luput dari pengawasan Dinas Pendidikan ini, seperti banyak sekolah yang masih membutuhkan guru, tidak seimbang antara guru dengan murid</p>

Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di Kota Batam pada tahun 2017, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 dengan objek penelitian adalah guru SD Negeri		
Ginoga, S. 2017	Penataan dan Pemerataan Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	(1) Perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum berada pada kriteria perencanaan yang baik dengan hasil presentasi capaian adalah 57% atau berada pada kategori Cukup. (2) Implementasi penataan dan pemerataan guru PNS Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga belum berada pada kriteria implementasi yang baik dengan hasil presentasi capaian adalah 62,12% atau berada pada kategori Cukup. Dan (3) Dampak penataan dan pemerataan guru PNS Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberi hasil signifikan dengan hasil presentasi capaian adalah 68,9% atau berada pada kategori Baik.
Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bolaang, Kabupaten Mongondow Utara pada tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan, implementasi, dan dampak dari penataan dan pemerataan guru PNS Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala dinas, Kepala-kepala Bidang Dinas pendidikan dan seluruh Kepala sekolah SDN Se-Kabupaten Bolaang Mogondow Utara sedangkan penelitian yang akan dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 dengan objek penelitian adalah guru SD Negeri.		

C. Kerangka Berpikir

Guru merupakan bagian utama dari pendidikan, oleh karena itu kebutuhan guru setiap sekolah harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Untuk menyikapi hal tersebut maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam membuat kebijakan penempatan guru. Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan mutasi terhadap guru yang mengalami penumpukan.

Dalam penempatan guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar perlu di perhatikan perhitungan jumlah kebutuhan guru agar penempatan guru dapat merata dan ideal sesuai kebutuhan masing-masing Sekolah Dasar Negeri tersebut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

D. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep merupakan kegiatan menjabarkan Konsep ke dalam indikator menurut Sugiono (2008:39) menyatakan bahwa “Konsep penelitian adalah suatu atribut atau suatu sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan”.

Tabel 2. Operasional Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator
Peraturan Besama 5 Menteri No 11 Tahun 2011	1. Guru Kelas	Jumlah Rombel X 1 Guru
	2. Agama	1 Sekolah X 1 Guru Agama
	3. Penjaskes	1 Sekolah X 1 Guru Olah Raga
Manajemen Sumber Daya Manusia (Jay, 2008)	1. Rekrutmen	
	2. Seleksi	
	3. Menempatan	
	4. Penilaian Kinerja	
	5. Pengembangan Karir Guru	



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan detail pola penempatan dan persebaran Guru SD yang berstatus PNS di Kabupaten Aceh Tengah. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipakai sesuai dengan defenisi dari Ali (1985) yang menyatakan bahwa metode deskriptif adalah “metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis pengolahan data, membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan tujuan untuk pemecahan masalah yang ada sekarang, melalui cara penggambaran keadaan secara objektif berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dengan penafsiran data yang ada

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah Pegawai Negeri Sipil pada seluruh SD yang terdapat di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2018 dan dinas terkait.

Dalam penelitian kualitatif, sumber data diperoleh melalui sampel yang dikenal dengan sebutan informan. Penetapan sampel didasarkan pada pertimbangan “*purposeful sampling*” atau “purposif sampel”. Artinya, penetapan sampel didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Dalam penelitian ini penulis memilih tipe sampel purposif “*snowball or chain sampling*”. Pertimbangan atau alasan yang digunakan pada pemilihan informan adalah adanya kesesuaian tupoksi informan dengan materi penelitian, dimana para informan adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan sistem kependidikan dan kepegawaian serta terlibat dalam proses penempatan guru PNS Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah. Informan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Aparatur pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah.
3. Kepala Seksi Mutasi Kepangkatan dan Jabatan pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah.
4. Para Kepala Sekolah Dasar sebanyak 14 orang.
5. Guru PNS Sekolah Dasar sebanyak 14 orang.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai peneliti karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai

instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Dan yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Selain itu, peneliti juga dibantu dengan panduan observasi dan panduan wawancara.

Pada penelitian ini, setelah fokus penelitian menjadi jelas barulah instrumen penelitian sederhana dikembangkan. Hal tersebut dilakukan untuk mempertajam serta melengkapi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka memenuhi target sasaran penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya;

1. Metode Pengamatan Partisipatif (*participant observation*)

Pada metode ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai "*participant observation*". Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh pokok permasalahan dan mendapatkan informasi secara jelas terkait dengan pelaku, peristiwa dan tempat.

2. Metode Wawancara

Menurut Arikunto (1998:145), wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui percakapan secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala

Sekolah, Guru SD dan yang terkait di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga pertanyaan yang diajukan peneliti lebih terarah dan tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan dengan menciptakan suasana percakapan yang sopan, terarah dan tepat sasaran sehingga wawancara dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan data yang akurat dan tepat.

Kegunaan teknik wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai jumlah guru pada setiap klasifikasi, jumlah lokal, jumlah jam pelajaran per minggu, dan jumlah maksimum wajib mengajar per minggu.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:274), dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder berupa data jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa dan alamat sekolah di Kabupaten Aceh Tengah yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, peta administratif Kabupaten Aceh Tengah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Proses dokumentasi dilakukan pada waktu pengumpulan data baik penelitian pendahuluan dan penelitian hasil. Data yang dikumpulkan dari teknik dokumentasi adalah data.

E. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman (1992) dalam Tresiana (2013), yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan penempatan guru PNS Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Aceh Tengah.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan penempatan guru PNS Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Aceh Tengah direduksi untuk digolongkan ke dalam tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulannya.

3. Penyajian Data (*display data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disusun rapi dan teratur, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data mempermudah peneliti

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan maupun pada dokumentasi. Penjelasan dari hasil penelitian akan memberikan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Tengah

Aceh tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Ibukota Kabupaten Aceh Tengah yaitu Takengon, yang memiliki luas wilayah 445.404,12 Ha terdiri dari 14 Kecamatan dan 268 Desa. Ke-14 Kecamatan tersebut antara lain: Atu Lintang, Bebesen, Bies, Bintang, Celala, Jagong Jeget, Kebayakan, Ketol, Kute Panang, Linge, Lut Tawar, Pegasing, Rusip Antara, dan Silih Nara. Luas daerah dapat dilihat pada Tabel 3. dan peta daerah dapat dilihat pada gambar 2.

Tabel 3. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Lut Tawar	8.310,16
2.	Kebayakan	4.817,95
3.	Kute Panang	2.094,86
4.	Bebesen	2.895,52
5.	Pegasing	18.687,11
6.	Bies	1.231,55
7.	Rusip Antara	59.931,33
8.	Silih Nara	7.504,35
9.	Ketol	61.146,86
10.	Bintang	57.826,07
11.	Celala	10.881,85
12.	Atu Lintang	14.626,87
13.	Jagong Jeget	18.824,75
14.	Linge	176.624,89
Total		445.404,13

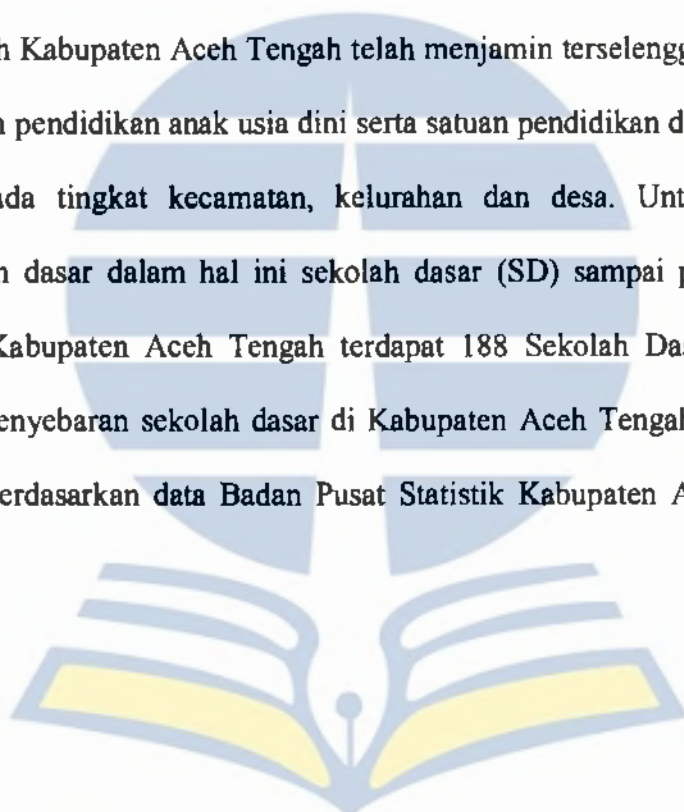
Sumber: Buku Putih Sanitasi (BPA) Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan terluas di Aceh Tengah adalah Linge seluas 176.624,89 ha dan merupakan kecamatan yang jauh dari pusat kota. Kecamatan lain yang jauh dari

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa deskriminasi.

Pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Tengah menjadi dua yaitu yang dikelola oleh pemerintah biasanya disebut Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri sedang yang kedua dikelola oleh masyarakat biasanya disebut Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, permasalahan saat ini adalah pemerataan guru di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan kurangnya guru PNS. Di kabupaten Aceh Tengah sendiri belum memiliki kebijakan/ qanun tentang penataan dan pemerataan guru.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menjamin terselenggaranya pendidikan dari satuan pendidikan anak usia dini serta satuan pendidikan dasar dan menengah hingga pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Untuk tingkat satuan pendidikan dasar dalam hal ini sekolah dasar (SD) sampai pada Januari tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tengah terdapat 188 Sekolah Dasar Negeri (SDN). Adapun penyebaran sekolah dasar di Kabupaten Aceh Tengah dijabarkan dalam Tabel 4 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017.



Tabel 4. Banyak Penduduk dan Sekolah Dasar Negeri per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk*	Jumlah Desa*	Jumlah SD Negeri**
1.	Lut Tawar	20.637	18	10
2.	Kebayakan	16.131	20	9
3.	Kute Panang	7.703	24	13
4.	Bebesen	39.437	28	17
5.	Pegasing	19.962	31	18
6.	Bies	7.247	12	7
7.	Rusip Antara	6.970	16	10
8.	Silih Nara	23.479	33	18
9.	Ketol	12.912	25	22
10.	Bintang	9.671	24	13
11.	Celala	9.453	17	10
12.	Atu Lintang	6.629	11	11
13.	Jagong Jeget	10.170	10	8
14.	Linge	10.013	26	22
Total		200.414	295	188

Sumber : * BPS Aceh Tengah dalam Angka 2017 (Update Desember 2017)

**Dinas Pendidikan per 18 Januari 2018 (diolah)

Pada setiap kecamatan di Aceh Tengah sudah memiliki satuan pendidikan sekolah dasar negeri (SDN). Dimana dalam sebaran sekolah dasar pada tiap kecamatan sangat beragam, untuk kecamatan dengan jumlah sekolah dasar paling sedikit yaitu di kecamatan Bies dengan 7 unit Sekolah Dasar Negeri, sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah sekolah dasar terbanyak yaitu pada kecamatan Ketol dan Kecamatan Linge sebanyak masing-masing 22 unit Sekolah Dasar Negeri, kecamatan Pegasing dan Kecamatan Silih Nara dengan masing-masing sebanyak 18 unit Sekolah Dasar Negeri.

Diketahui bahwa hanya Kecamatan Atu Lintang saja yang memiliki sekolah dasar pada setiap desa, sedangkan kecamatan lainnya tidak semua desa memiliki sekolah dasar. Ketiadaan sekolah dasar pada setiap desa dapat mempersulit anak-anak untuk berjalan kaki yang dapat mencapai beberapa kilometer dari rumahnya, beberapa daerah yang memiliki wilayah kecil dan prasarana kendaraan yang

cukup tidak menjadi penghalang akan hal ini, namun depalan dari 14 kecamatan memiliki wilayah yang luas, seperti halnya kecamatan Linge yang memiliki 26 desa hanya memiliki 22 sekolah dasar dengan luas 176.624,89 ha. Kekurangan ini dapat dikarenakan jumlah penduduk yang sangat sedikit, sehingga tidak dimungkinkan membuka sekolah dasar negeri.

Dengan keberadaan Sekolah Dasar yang cukup beragam pada setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, serta letak sekolah dengan desa-desa atau perkampungan yang belum mempunyai akses jalan yang baik juga sangat beragam. Sehingga anak didik yang hendak ke sekolah harus menempuh jarak yang jauh bahkan alat transportasi tidak ada, terutama kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota. Seperti halnya Kecamatan Ketol dan Kecamatan Linge. Kecamatan Ketol dan Linge memiliki jumlah sekolah yang lebih banyak, hal ini disebabkan banyaknya desa dan luasnya daerah kecamatan tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah membangun sekolah agar anak-anak dapat menjangkau. Keadaan terbalik di kecamatan Lut Tawar, Kebayakan dan kecamatan Behesen, walau pun memiliki luas daerah yang tidak terlalu besar, daerah ini juga memiliki banyak penduduk. Keadaan ini membuat daerah membangun sekolah yang lebih atau menambah rombongan pada sekolah di kecamatan tersebut.

B. Hasil Penelitian

1. Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Tengah

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Aparatur BKPSDM kabupaten Aceh Tengah terkait proses penempatan guru PNS di SD Negeri, menyatakan bahwa:

“Terdapat beberapa syarat yang harus tersedia dalam penempatan, pertama adalah permohonan yang bersangkutan, kedua adalah rekomendasi sekolah yang menerima, ketiga adalah rekomendasi sekolah lama dan terakhir adalah rekomendasi Dinas Pendidikan. Namun, dalam beberapa kasus tetap pindah atas kebijakan pemimpin”

Masih terdapat beberapa kasus penempatan yang tidak mengikuti persyaratan, Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris Dinas Pendidikan kabupaten Aceh Tengah, yang menyatakan bahwa:

“Menjadi tugas kita Dinas Pendidikan untuk mengoptimalkan SDM yang ada. Penempatan atau mutasi yang kita lakukan juga belum maksimal sesuai prosedur, setidaknya ada 20 persen penempatan itu pengaruh politik, dan kita sudah lebih baik dari tahun sebelumnya untuk manajemen penempatan”

Keadaan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah masih kurang memadai dari segi tenaga pendidik yang tersebar di 14 kecamatan dengan total 188 sekolah dasar. Hasil penelitian telaah dokumen yang dilakukan pada Dinas Pendidikan mendapatkan data Kebutuhan dan ketersediaan Guru PNS di Sekolah Dasar Negeri yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kebutuhan dan ketersediaan guru PNS Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kebutuhan Guru	Ketersediaan Guru	Kurang	Lebih
1	Kec. Lut Tawar	117	116	-1	
2	Kec. Kebayakan	83	91	-	8
3	Kec. K.Panang	101	76	-25	

4	Kec. Bebesen	160	172	-	12
5	Kec. Pegasing	143	126	-17	
6	Kec. Bies	56	55	-1	
7	Kec. Rusip	80	28	-52	
8	Kec. Silih Nara	151	110	-41	
9	Kec. Ketol	178	73	-105	
10	Kec. Bintang	104	72	-32	
11	Kec. Celala	81	26	-55	
12	Kec. Atu Lintang	92	21	-71	
13	Kec. Jagong	71	42	-29	
14	Kec. Linge	171	56	-115	
Total		1.588	1.064	-544	20

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah 2018

Tabel. menunjukkan tidak meratanya penempatan guru PNS di sekolah-sekolah dasar, kekurangan terbanyak ada di kecamatan Linge dan kecamatan Ketol yang melebihi 100 orang guru PNS, sedangkan kecamatan Kebayakan dan kecamatan Bebesen memiliki kelebihan guru sebanyak 20 orang. Terkait banyaknya kekurangan guru PNS di beberapa kecamatan, hasil wawancara dengan sekretaris Dinas Pendidikan bahwa:

“Ini masalah utama kita, kekurangan guru PNS karena Aceh Tengah saat ini tidak bisa membuka penerimaan PNS sampai tahun 2020 dikarenakan APBD Kabupaten Aceh Tengah yang sudah terpakai lebih dari 50% untuk belanja pegawai, kita stop penerimaan pegawai termasuk guru. Ini menjadi kerjaan rumah bersama Dinas Pendidikan, dinas terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Saat ini yang dapat dilakukan untuk kekurangan ini, ada bantuan guru dari provinsi dan kekurangannya kita tutup dengan tenaga kerja honorer”.

Terkait dengan lebihnya guru di Kecamatan Bebesen dan Kecamatan Kabayakan, hasil wawancara dengan sekretaris Dinas Pendidikan menyatakan bahwa:

“Saat ini ada permasalahan penempatan guru di Aceh Tengah, masalah utama itu adalah jumlah guru yang sedikit, sehingga kalau ada sekolah dasar yang berlebih sedikit dari kebutuhan minimal guru, bisa menjadi masalah besar. Di Kecamatan Bebesen contohnya yang memiliki 17

sekolah dasar dan berlebih 12 orang, ada beberapa sekolah di Kecamatan yang memiliki guru lebih"

Total kebutuhan guru PNS di SD Negeri Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 1.588 orang sedangkan ketersediaan guru PNS sebanyak 1.064 orang. SD Negeri di Kabupaten Aceh Tengah mengalami kekurangan guru sebanyak 544 orang.

Pada setiap sekolah dasar, terdapat 3 satuan pendidikan guru yaitu guru kelas, guru Pendidikan Agama Islam dan guru Penjaskes. Dari hasil pengolahan data dinas pendidikan, manajemen penempatan guru per satuan pendidikan disajikan pada Tabel 6. berikut ini

Tabel 6. Rataan rasio penempatan satuan pendidikan di sekolah dasar negeri

No	Satuan Pendidikan	Rasio Penempatan
1	Guru Kelas	1 Guru : 1 Rombongan Belajar
2	Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	1 Guru : 6 Rombongan Belajar
3	Guru Pendidikan Agama Islam	1 Guru : 6 Rombongan Belajar

Sumber: Dinas Pendidikan

Hasil wawancara kepada Kepala Sekolah SD Negeri 8 Kebayakan yang memiliki 2 guru PAI dan 2 guru Penjaskes, menyatakan:

"Kami menambah kebutuhan guru PAI dan guru Penjaskes karena banyaknya siswa, kita memiliki 12 rombongan belajar tahun ini, sehingga kebutuhan untuk guru mata pelajaran tersebut ditambah. Ini berguna untuk meningkatkan kuantitas pendidikan anak-anak"

Dari hasil wawancara tersebut, keputusan penambahan kebutuhan guru PNS mata pelajaran PAI dan Penjaskes adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan, hal senada juga disampaikan kepala sekolah SD Negeri 1 Lut Tawar, yang menyatakan:

“Ya, kita memiliki 12 rombongan belajar, jadi kalau hanya 1 guru PAI dan 1 guru olahraga atau Penjaskes proses belajar kurang efektif, sekolah kita saat ini memiliki 1 guru PAI dan 2 guru Penjaskes, kita butuh 1 lagi guru PAI”

Terkait hal ini, hasil wawancara kepada sekretaris Dinas pendidikan kabupaten Aceh Tengah menyatakan:

“Memang benar, banyak sekolah yang memberikan formasi kebutuhan guru PAI dan Penjaskes kepada kami. Setiap SD Negeri wajib memiliki 1 guru PAI dan 1 guru Penjaskes disekolahnya, boleh lebih sesuai dengan kebutuhan. Namun, banyak sekolah lain yang membutuhkan guru tersebut, ada sekolah yang tidak memiliki satu pun guru PAI dan guru Penjaskes, jadi kita batasi kepada setiap sekolah yang memiliki banyak siswa, banyak rombongan belajar paling banyak 2 orang guru pada setiap sekolah untuk mata pelajaran tersebut”

Di hasil telaah dokumen, diketahui bahwa beberapa sekolah memiliki lebih dari 12 rombongan belajar, seperti SD Negeri 10 Bebesen yang memiliki 18 rombongan belajar dengan kebutuhan guru PAI dan guru Penjaskes masing masing 2 orang. Sedangkan beberapa SD Negeri yang memiliki kurang dari 6 rombel, seperti SD Negeri 22 Linge yang memiliki 3 rombel, membutuhkan guru PAI dan guru Penjaskes masing-masing 1 orang.

2. Kendala dalam Pemerataan Guru PNS di Kabupaten Aceh Tengah

Hasil penelitian yang didapat, bahwa terdapat beberapa kendala dalam pemerataan Guru PNS di Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya adalah kekurangan guru PNS SD Negeri, Guru PNS yang pensiun, keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah dan pengaruh sosial guru PNS kota yang dimutasi ke daerah pedesaan.

a. Kekurangan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekolah Dasar

Jika dilihat dari kebutuhan guru menurut satuan pendidikannya, maka guru sekolah dasar terbagi menjadi tiga yaitu guru pendidikan agama,

pendidikan jasmani dan kesehatan serta guru kelas. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa terdapat kekurangan guru PNS pada ketiga satuan pendidikan ini.

1) Kecukupan Guru Kelas

Kecukupan Guru Kelas PNS di SD Negeri dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah guru kelas PNS yang tersedia dikurangi dengan jumlah rombel sebagai kebutuhan guru kelas. Dari hasil penelitian, didapatkan data kondisi guru kelas PNS per kecamatan pada SD Negeri di kabupaten Aceh Tengah dan tersaji pada pada Tabel 7. berikut ini.

Tabel 7. Kondisi Guru Kelas PNS di SD Negeri

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Guru Kelas			
				Kebutuhan Guru PNS	Guru PNS	Kurang	Lebih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. Lut Tawar	10	89	89	90	-	1
2	Kec. Kebayakan	9	63	63	68	-	5
3	Kec. K.Panang	13	75	75	54	-21	
4	Kec. Bebesen	17	122	122	128	-	6
5	Kec. Pegasing	18	107	107	98	-9	
6	Kec. Bies	7	42	42	37	-5	
7	Kec. Rusip	10	60	60	22	-38	
8	Kec. Silih Nara	18	115	115	81	-34	
9	Kec. Ketol	22	134	134	64	-70	
10	Kec. Bintang	13	78	78	61	-17	
11	Kec. Celala	10	61	61	17	-44	
12	Kec. Atu Lintang	11	70	70	18	-52	
13	Kec. Jagong	8	53	53	38	-15	
14	Kec. Linge	22	127	127	47	-80	
Total per Kabupaten		188	1.196	1.196	823	-385	12

Sumber: Dinas Pendidikan, Keadaan 18 Januari 2018

Total kebutuhan guru kelas dari data dinas pendidikan didapatkan bahwa total kebutuhan guru sebanyak 1.196 orang yang tersebar di 14

kecamatan dan ketersediaan guru pegawai negeri sipil sebanyak 823 orang, sehingga sekolah dasar negeri di kabupaten Aceh Tengah mengalami kekurangan sebanyak 385 orang guru.

Kekurangan terbesar ada di kecamatan Linge sebanyak 80 guru PNS dan kecamatan Ketol sebanyak 70 guru PNS. Sedangkan terdapat 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah guru kelas PNS berlebih yaitu kecamatan Lut Tawar sebanyak 1 orang, kecamatan kebayakan sebanyak 5 orang dan kecamatan Bebesen sebanyak 6 orang.

2) Kecukupan Guru PNS mata pelajaran Penjaskes di SD Negeri

Dari hasil penelitian, didapatkan data kondisi guru PNS mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) per kecamatan pada SD Negeri di kabupaten Aceh Tengah dan tersaji pada pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Kondisi Guru PNS mata pelajaran Penjaskes di SD Negeri

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Guru Penjaskes			
				Kebutuhan Guru PNS	Guru PNS	Kurang	Lebih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. Lut Tawar	10	89	14	14	0	
2	Kec. Kebayakan	9	63	10	13	-	3
3	Kec. K.Panang	13	75	13	8	-5	
4	Kec. Bebesen	17	122	19	22	-	3
5	Kec. Pegasing	18	107	18	13	-5	
6	Kec. Bies	7	42	7	8	-	1
7	Kec. Rusip	10	60	10	3	-7	
8	Kec. Silih Nara	18	115	18	12	-6	
9	Kec. Ketol	22	134	22	6	-16	
10	Kec. Bintang	13	80	13	5	-8	
11	Kec. Celala	10	61	10	4	-6	
12	Kec. Atu Lintang	11	70	11	3	-8	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Guru Penjaskes			
				Kebutuhan Guru PNS	Guru PNS	Kurang	Lebih
13	Kec. Jagong	8	53	9	3	-6	
14	Kec. Linge	22	127	22	4	-18	
Total per Kabupaten		188	1198	196	118	-85	7

Sumber: Dinas Pendidikan, Keadaan 18 Januari 2018

Total kebutuhan guru PNS mata pelajaran Penjaskes di kabupaten Aceh Tengah sebanyak 196 orang dengan ketersediaan guru PNS sebanyak 118 orang, sekolah dasar negeri di kabupaten Aceh Tengah mengalami kekurangan guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan sebanyak 85 orang.

Terdapat 3 (tiga) kecamatan dengan guru Penjaskes berlebih 7 (tujuh) orang yaitu kecamatan Kebayakan sebanyak 3 guru, Bebesen sebanyak 3 guru dan kecamatan Bies sebanyak 1 guru.

3) Kecukupan Guru Pendidikan Agama Islam PNS di SD Negeri

Dari hasil penelitian, didapatkan data kondisi guru PNS mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) per kecamatan pada SD Negeri di kabupaten Aceh Tengah dan tersaji pada pada Tabel 9. berikut ini.

Tabel 9. Kondisi Guru PNS mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Guru Pendidikan Agama Islam			
				Kebutuhan Guru PNS	Guru PNS	Kurang	Lebih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. Lut Tawar	10	89	14	12	-2	
2	Kec. Kebayakan	9	63	10	10	0	
3	Kec. K.Panang	13	75	13	14	-	1
4	Kec. Bebesen	17	122	19	22	-	3
5	Kec. Pegasing	18	107	18	15	-3	

6	Kec. Bies	7	42	7	10	-	3
7	Kec. Rusip	10	60	10	3	-7	
8	Kec. Silih Nara	18	115	18	17	-1	
9	Kec. Ketol	22	134	22	3	-19	
10	Kec. Bintang	13	80	13	6	-7	
11	Kec. Celala	10	61	10	5	-5	
12	Kec. Atu Lintang	11	70	11	0	-11	
13	Kec. Jagong	8	53	9	1	-8	
14	Kec. Linge	22	127	22	5	-17	
Total/Kabupaten		188	1198	196	122	-80	7

Sumber: Dinas Pendidikan, Keadaan 18 Januari 2018

Total kebutuhan guru PNS mata pelajaran agama Islam di kabupaten Aceh Tengah sebanyak 196 orang dengan ketersediaan guru PNS sebanyak 122 orang. Sekolah dasar di kabupaten Aceh Tengah mengalami kekurangan guru PNS mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebanyak 80 orang.

Terdapat 3 (tiga) kecamatan dengan guru Pendidikan Agama Islam berlebih 7 (tujuh) orang yaitu kecamatan Bebesen, Bies dan kecamatan Kute Padang.

b. Guru Pensiun

Dari hasil telaah dokumen di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah didapatkan data jumlah Guru PNS yang telah pensiun dari tahun 2012 sampai tahun 2018 bulan Maret dan yang akan pensiun sampai akhir tahun 2018. Data pensiun guru PNS sekolah dasar negeri disajikan pada Tabel 10. berikut ini.

Tabel 10. Jumlah Guru PNS yang dan akan pensiun pada tahun 2012-2018

No	Tahun	Jumlah Pensiun
1	2	3
1.	2012	25
2.	2013	31
3.	2014	30
4.	2015	31
5.	2016	35
6.	2017	42
7.	2018 – Maret	21
8.	2018 akan pensiun	52
	Total	267

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah

Dari data guru PNS yang pensiun mulai tahun 2012 sampai tahun 2017 setidaknya sudah 194 guru PNS yang pensiun dan 73 guru pada tahun 2018.

B. Pembahasan

1. Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Tengah

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan telah diatur dalam Permendiknas No. 20 Tahun 2010 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007, dimana salah satu poinnya menyebutkan bahwa “pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar kabupaten, kota, kecamatan, maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan”. Dengan kata lain, penempatan guru PNS ke suatu daerah atau sekolah tidak dapat dilakukan secara sepihak karena harus sesuai dengan kebutuhan.

Manajemen penataan dan pemerataan guru PNS juga telah diatur dalam Juknis Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Kementrian tahun 2011. Peraturan tersebut mengamanatkan pemerintah daerah melakukan verifikasi data guru dan analisis kebutuban guru disetiap satuan pendidikan. Selanjutnya menyediakan peta guru yang menginformasikan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di wilayahnya, untuk kemudian segera ditindak lanjuti jika terdapat kekurangan atau kebutuhan guru melalui sistim perekrutan, penempatan dan pemindahan guru antar satuan pendidikan berdasarkan Petunjuk Teknis.

Penempatan dan pemerataan guru PNS tidak terlepas dari kebutuhan guru PNS pada suatu sekolah, sekolah yang mengalami kekurangan akan meminta pemenuhan guru pendidik agar proses belajar mengajar. Secara menyeluruh, masih terdapat banyak kekurangan guru PNS sebanyak 544 orang.

Menurut Ngalim (2007):

Terjadinya kekurangan guru seringkali merefleksikan adanya ketersediaan guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya ketidaksesuaian dalam penempatan guru.

Sesuai pernyataan Hartani (2011) dalam menghitung kebutuhan guru harus berdasarkan pada *enrolment* sekolah, jumlah jam per minggu, beban mengajar penuh guru, besar kelas yang dianggap efektif, jumlah guru yang ada, jumlah guru yang akan pensiun, dan jenjang sekolah. Pada tingkat SD harus terdapat guru kelas, guru agama, dan juga guru penjas. Sesuai dengan peraturan bahwa jumlah jam mengajar oleh guru minimal adalah 24 jam per

minggu. Untuk usia pensiun adalah pada usia 60 tahun. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 4 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pada penelitian ini yang dilihat dari Tabel 5. bahwa terdapat 2 kecamatan yang memiliki ketidaksesuaian dalam penempatan guru karena berlebih sebanyak 20 orang. Penumpukan ini terjadi di pusat kota kabupaten Aceh Tengah, yakni kecamatan Bebesen dan kecamatan Kebayakan Namun, tentu saja jika pemerataan dilakukan maka kekurangan guru juga tidak berubah secara signifikan karena kekurangan yang sangat banyak. Sehingga unsur utama dalam kekurangan guru PNS di kabupaten Aceh Tengah bukanlah ketidaksesuaian dalam penempatan guru namun lebih kepada ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merekrut tenaga pendidik guru PNS di lingkungan Sekolah Dasar Negeri.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dijelaskan, bahwa Setiap Sekolah Dasar (SD) harus mempunyai guru kelas sesuai dengan jumlah rombongan atau kelas yang ada, serta harus mempunyai minimal satu guru pendidikan agama dan satu guru pendidikan jasmani pada setiap sekolah dasar. Manajemen penempatan ini sudah berlaku di Kabupaten Aceh Tengah walau pun banyak yang belum terpenuhi. Hasil telaah data, bahwa banyak sekolah dasar di Kabupaten Aceh Tengah menerapkan bukan 1 sekolah 1 guru penjaskes dan guru PAI, namun menerapkan 1 guru penjaskes dan guru PAI ditentukan oleh banyaknya rombongan dengan batasan 2 guru Penjaskes dan 2 guru PAI setiap sekolah.

Ketidakmerataan penempatan guru PNS dapat berdampak pemberian sanksi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada pemerintah kabupaten berupa penundaan pemberian formasi penerimaan calon guru PNS yang dapat berdampak buruk terhadap ketersediaan guru PNS di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga menjadi tanggungjawab yang besar bagi pemda untuk segera mengoptimalisasi penempatan guru PNS di SD Negeri.

2. Kendala dalam Pemerataan Guru PNS di Kabupaten Aceh Tengah

a. Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Sekolah Dasar

Dari Tabel 5. menunjukkan bahwa kekurangan jumlah guru terjadi pada 12 dari 14 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 544 guru PNS pada tiga satuan pendidikan yaitu guru kelas, guru mapel pendidikan jasmani dan kesehatan serta guru pendidikan agama Islam. Pendistribusian guru yang terjadi di kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk memenuhi rombongan belajar yang ada. Jika di lihat dari kondisi guru kelas di SD Negeri pada Tabel 7. Terdapat tiga kecamatan sekitaran kota yaitu Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Kebayakan dan Kecamatan Bebesen yang jumlah gurunya dalam melebihi rombongan belajar yang ada, dimana guru kelas PNS sebanyak masing-masing 90, 68 dan 128, dimana tiga kecamatan tersebut dengan rombongan belajar sebanyak masing-masing 89, 63 dan 122. Sedangkan sekolah-sekolah di kecamatan yang lain jumlah guru yang ada tidak memenuhi kebutuhan rombongan belajar yang ada, sebagai contoh di Kecamatan Linge dan Kecamatan Ketol dengan jumlah rombongan belajar

masing-masing sebanyak 127 dan 134, sedangkan guru kelas yang ditempatkan hanya sebanyak 47 guru dari 22 unit Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Linge dan sebanyak 64 guru dari 22 unit Sekolah Dasar Negeri. Diketabui bahwa semakin jauh kecamatan dari daerah ibukota Kabupaten Aceh Tengah maka kesenjangan persediaan Guru PNS semakin besar.

Dilihat dari kondisi ketersediaan guru PNS yang berlebih, guru kelas pada Tabel 7. sebanyak 12 orang di 3 (tiga) kecamatan, guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan pada Tabel 8. sebanyak 7 orang di 3 (tiga) kecamatan dan guru Pendidikan Agama Islam pada Tabel 9. Sebanyak 7 orang di 3 (tiga) kecamatan. Kelebihan dapat diartikan keborosan atau ketidakefektifan karena SDM yang seharusnya dapat ditempatkan di tempat yang mengalami kekosongan menjadi sia-sia dan menambah kekurangan guru.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas yang tidak mudah dalam mengatasi kesenjangan ketersediaan Guru PNS di SD Negeri khususnya di daerah terluar Kabupaten Aceh Tengah. Perhitungan yang dilakukan untuk kebutuhan guru berdasarkan SKB 5 Menteri tentang penempatan pada sekolah dasar disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar. Melihat dari peraturan tersebut, jumlah minimal guru yang harus ditempatkan pada sekolah dasar seperti di kecamatan Linge adalah sebanyak 171 orang guru, sedangkan jumlah guru yang ada saat ini sebanyak 56 orang maka kecamatan Linge masih mengalami kekurangan guru sebanyak 115 orang. Sekolah dasar di kecamatan Linge yang mengalami kekurangan jumlah guru harus mengampu untuk mengajar

lebih dari satu rombongan belajar untuk satu guru dan tentunya akan mempengaruhi kualitas, efektifitas dan efisiensi belajar dan mengajar di kecamatan tersebut.

Jumlah rombongan belajar (rombel) dan guru kelas pada sekolah dasar negeri per kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada Tabel 7. di dapatkan bahwa Kabupaten Aceh Tengah saat ini memiliki guru yang sangat terbatas dan pendistribusiannya pada sekolah-sekolah dasar yang kurang merata sesuai kebutuhan, seperti pada kecamatan Ketol dan Kecamatan Linge yang berada pada daerah terluar di Kabupaten Aceh Tengah, memiliki jumlah sekolah yang sama dan jumlah rombel yang sedikit berbeda tetapi mengalami kekurangan guru yang sangat signifikan, keadaan penyebaran yang tidak merata ini akan menjadi dasar masalah dalam kegiatan pendidikan yang berlangsung di sekolah dan menjadi hambatan dalam pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan, hal inilah yang menjadi pendorong terbitnya Peraturan Bersama 5 Menteri mengenai Penataan dan Pemerataan guru PNS yang mendorong setiap pemerintah daerah untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan ketersediaan, penyebaran dan kesesuaian guru disetiap jenjang dan jenis pendidikan.

Dalam proses belajar mengajar bagi sekolah-sekolah yang kekurangan guru, tentu akan menjadi kurang maksimal serta menjadi tidak efisien. Sehingga akan dapat mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia (SDM) anak didik, karena dalam proses belajarnya di sekolah tidak diperoleh secara maksimal sesuai dengan jam belajar yang telah ditetapkan

oleh pemerintah. Seperti hasil wawancara dengan salah satu guru SD Negeri 22 di Kecamatan Linge mengatakan bahwa:

Dilakukan dengan cara merotasi anak-anak didik pada saat kegiatan belajar mengajar, dalam satu kelas akan di gabung antara kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga) dan kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam), setelah mengajarkan materi dikelas yang pertama baru melanjutkan kegiatan mengajar untuk kelas yang kedua.

Pola penggabungan kelas dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang terjadi di SD Negeri 22 Linge merupakan cerminan dalam proses belajar mengajar pada setiap sekolah-sekolah dasar yang masih memiliki masalah kekurangan tenaga guru yang cukup besar. Keadaan ini akan sangat mempengaruhi hasil dari proses belajar yang berlangsung, dimana tingkat pemahaman akan materi yang diajarkan kepada murid di kelas menjadi kurang dan tidak maksimal. Bahkan tingkat pengetahuan mereka akan berbanding terbalik dengan anak-anak yang sekolah diperkotaan atau sekolah yang secara jumlah tenaga pendidik cukup memadai.

Keterbatasan Pemerintah Daerah terhadap pengadaan PNS guru menjadi faktor utama kekurangan guru PNS dan tidak meratanya penyebaran atau penempatan guru di Kabupaten Aceh Tengah. Walau pun dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 41 ayat 3 disebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu”, Mengacu pada kondisi riil dilapangan tentang keadaan jumlah guru PNS yang sangat minim pada beberapa sekolah yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, ini berarti pemerintah maupun pemerintah

kabupaten belum secara baik memenuhi kewenangan yang telah diberlakukan seperti yang disebutkan dalam pasal 41 ayat 3 UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk memfasilitasi serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang memadai guna mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Aceh Tengah.

Layanan pendidikan yang sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah terpencil menjadi tidak maksimal yang seharusnya sekolah menjadi salah satu faktor penentu baik tidaknya sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah dan mempengaruhi laju pertumbuhan daerah tersebut seperti yang diungkapkan oleh Jhingan (2006) bahwa guna mencapai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka dibutuhkan beberapa upaya diantaranya adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia.

Kuantitas yang tidak mencukupi serta kualitas pendidikan yang kurang baik akan menghasilkan SDM yang kurang baik dan dapat memperlambat pertumbuhan daerah. Di daerah terpencil, sekolah merupakan satu-satunya tempat dimana anak-anak bangsa dapat belajar dikarenakan profesi orang tua yang bekerja di pertanian dan perkebunan harus bekerja dari pagi sampai sore serta pendidikan orang tua yang rendah atau bahkan buta huruf menjadikan sekolah sebagai satu-satunya tumpuan pendidikan membuat kebutuhan sekolah dasar menjadi titik kritis peningkatan peradaban manusia terutama di daerah terpencil.

Keadaan saat ini, masih ada masyarakat yang tergolong buta huruf, hal ini menjadi tumpuan bahwa pendidikan sangat penting di suatu daerah,

menunjukkan pula bahwa pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah masih belum optimal. Oleh karena itu pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu untuk mengkaji ulang secara baik penempatan guru yang merata khususnya pada daerah-daerah terpencil, sehingga proses belajar anak dapat maksimal di sekolah. Berbeda dengan anak-anak yang sekolah diperkotaan yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dan tingkat pendidikan orang tuanya yang baik, selain itu guru di sekolah memadai dengan sarana prasarana yang lengkap, dan tidak sedikit orang tua memberi atau membayar layanan belajar tambahan diluar jam sekolah.

Dengan fenomena seperti ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah penting untuk mengambil sebuah langkah atau menetapkan kebijakan yang tepat untuk memperhatikan anak-anak yang bersekolah di pedalaman yang mana pada sekolah tersebut jumlah gurunya sangat terbatas dan sarana prasarana yang terbatas pula.

Ketersediaan guru PNS beberapa daerah di Kabupaten Aceh Tengah sudah sangat memprihatinkan, di beberapa Sekolah Dasar Negeri di beberapa kecamatan sama sekali tidak memiliki guru PNS. Data sekolah dasar yang tidak memiliki guru PNS sama sekali disajikan pada Tabel 11. sebagai berikut.

Tabel 11. Beberapa SDN tanpa guru PNS di Kabupaten Aceh Tengah.

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Kebutuhan Guru*	Ketersediaan Guru PNS**
1	SDN 10 Rusip Antara	Rusip Antara	6	8	0
2	SDN 18 Silih Nara	Silih Nara	6	8	0
3	SDN 20 Ketol	Ketol	7	9	0
4	SDN 21 Ketol	Ketol	6	8	0
5	SDN 22 Ketol	Ketol	5	7	0
6	SDN 4 Atu Lintang	Atu Lintang	7	9	0

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Kebutuhan Guru*	Ketersediaan Guru PNS**
7	SDN 9 Atu Lintang	Atu Lintang	6	8	0
8	SDN 10 Atu Lintang	Atu Lintang	6	8	0
9	SDN 20 Linge	Linge	5	7	0
10	SDN 21 Linge	Linge	6	8	0
11	SDN 22 Linge	Linge	3	5	0

Sumber: Dinas Pendidikan (update 18 Januari 2018) *diolah*

* 1 guru agama, 1 guru Penjaskes, selebihnya guru kelas

** Guru Kelas, Guru Agama dan Guru Penjaskes

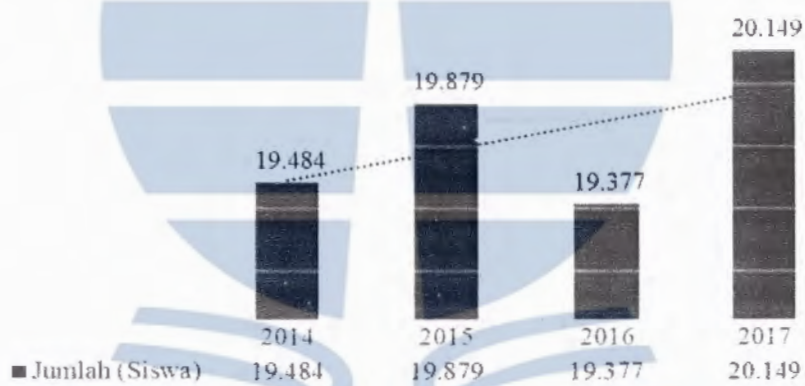
Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, terdapat setidaknya 11 SDN di Kabupaten Aceh Tengah yang tidak memiliki Guru PNS dan sebanyak 33 sekolah SDN yang hanya memiliki 1 sampai 2 orang PNS di sekolah tersebut.

Ketersediaan guru di sekolah yang akan mendidik dan mengajar masih kurang terutama sekolah yang jauh dari pusat kota Kabupaten Aceh Tengah, dengan jumlah guru yang kurang pada setiap sekolah tentu akan mempengaruhi proses belajar anak didik menjadi tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Gigona (2017) yang menyatakan bahwa kekurangan guru PNS berdampak pada proses belajar mengajar. Respon yang diperoleh cukup signifikan yakni 77,8% dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses belajar siswa. Aspek ini harusnya diutamakan mengingat muara dari keseluruhan proses penataan dan pemerataan guru PNS ini adalah pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di sekolah. Dampak lain adalah jam wajib mengajar guru PNS terganggu dengan angka signifikan yakni 72%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah mengatakan bahwa:

“Yang menjadi kendala dalam kekurangan guru di Kabupaten Aceh Tengah disebabkan karena selama 7 (tujuh) tahun terakhir tidak adanya pembukaan penerimaan CPNS baru. Kondisi APBK Aceh Tengah juga tidak memungkinkan untuk Kabupaten Aceh Tengah membuka penerimaan CPNS, serta banyaknya pembukaan Sekolah”

Lamanya peniadaan penerimaan CPNS di Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, mengakibatkan bertambahnya jumlah kekurangan tenaga pendidik khususnya guru sekolah dasar yang cukup besar. Sedangkan dilain pihak pertumbuhan anak usia sekolah dari tahun ke tahun semakin bertambah. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3. Grafik pertambahan siswa sekolah dasar di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2014-2017 menunjukkan peningkatan *trendline*.



Gambar 3. Grafik Pertambahan Siswa SD di Kabupaten Aceh Tengah
Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2017

Pada Gambar 3. menunjukkan peningkatan sebesar 665 siswa selama 3 tahun terakhir, walaupun terjadi pengurangan jumlah siswa pada tahun 2015. Dengan bertambahnya jumlah anak usia sekolah dasar yang cukup besar tentu diharapkan adanya penambahan ketersediaan guru yang memadai, agar di dalam proses pembelajaran anak didik dapat maksimal dan tidak terabaikan. Sampai pada Januari tahun 2018 jumlah tenaga

pendidik (guru PNS) sekolah dasar negeri di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 1.064 orang guru PNS, sedangkan berdasarkan data Dinas Pendidikan menggambarkan kebutuhan guru sekolah dasar di Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung proses pendidikan yang bermutu memerlukan tenaga pendidik sebanyak 1.588 orang guru, melihat bahwa ketersediaan guru belum memenuhi kebutuhan yang diperlukan, maka kekurangan guru PNS Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Tengah sampai saat ini sebanyak 544 orang guru dan tercatat 20 orang guru PNS menjadi sia-sia karena tertumpuk atau berlebih di dua sekolah.

Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, dengan total sekolah sebanyak 188 sekolah dan jumlah siswa sekolah dasar sebanyak 20.149 siswa serta 1.198 rombel, kabupaten Aceh Tengah hanya memiliki 1.064 guru pendidik sekolah PNS dengan kebutuhan guru PNS sebanyak 1.588, karena terkendala tidak dapat menambah jumlah PNS, Pemerintah kabupaten Aceh Tengah memprioritaskan optimalisasi pendidikan di daerah perkotaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar di perkotaan. Dari data gambar 3. Kabupaten Aceh Tengah perlu mengantisipasi kenaikan jumlah siswa yang berdampak pada kenaikan rombongan belajar, jumlah ruang kelas dan ketersediaan guru kelas dan guru mata pelajaran terutama pengganti guru-guru yang berkurang karena usia pensiun, menurut Dakir (1989:208) perlu memperhatikan jumlah siswa pada permulaan tahun, jumlah rata-rata presentase mengulang pada tahun-tahun sebelumnya, dan jumlah rata-rata prosentase pindah sekolah pada tahun sebelum-sebelumnya.

Pertimbangan efektivitas dan efisiensi terhadap prioritas pendidikan diperkotaan karena sebagian besar tenaga pendidik memang berasal dari perkotaan, kuantitas siswa yang lebih banyak dan sarana prasarana yang lebih lengkap. Dengan pertimbangan ini dan kondisi dimana kekurangan sebanyak 544 guru PNS, membuat sekolah-sekolah dasar di daerah yang jauh dari perkotaan banyak kekurangan guru. Saat ini, solusi yang dilakukan oleh sekolah adalah mempekerjakan tenaga honor dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau bantuan tenaga honor dari pemerintah provinsi Aceh.

Kekurangan guru utamanya disebabkan tidak adanya rekrutmen, dalam hal ini kendala utama adalah masalah pendanaan. Dalam peraturan lima menteri tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil Bab VI Pasal 7 ayat (3) bahwa Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penambahan tenaga pendidik PNS otomatis akan menambah pengeluaran APBD kabupaten. Batas kabupaten mengadakan rekrutmen PNS berdasarkan kekuatan APBD kabupaten adalah sebesar 50% dari total APBD untuk belanja pegawai. Kabupaten Aceh Tengah sudah tidak dapat mengadakan rekrutmen PNS terutama guru sekolah dasar karena telah menggunakan lebih dari 50% APBD kabupaten untuk belanja pegawai.

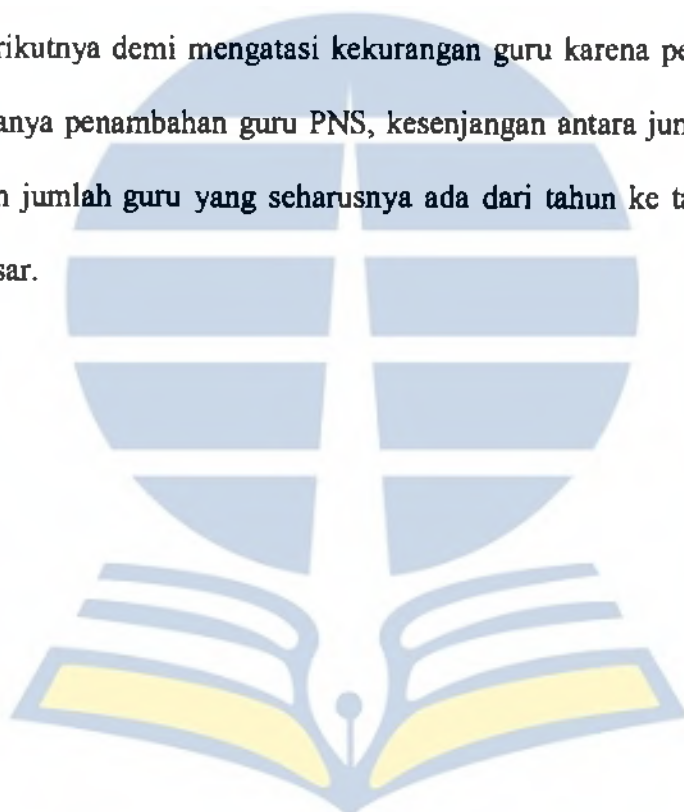
Penempatan guru juga sering terkendala oleh SDM dan efek dari penempatan guru tersebut. Mundi'U (2013) dalam tulisannya menyatakan bahwa ada dua pertimbangan dalam penempatan guru yaitu pertimbangan kemanusiaan, efisiensi dan efektifitas. Penempatan guru dengan cara memindahkan guru tersebut dari kota tempat ia tinggal, sama dengan memindahkan keluarga, aset-aset seperti sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Sangat banyak pertimbangan yang harus dilakukan untuk melakukan pemindahan. Hal ini dikarenakan keinginan guru seperti berada dekat dengan keluarga atau tempat tinggal mereka. Menurut Behrstock dan Clifford (2010) dalam Ginoga (2017) membenarkan teori (Loeb & Reininger, 2004) bahwa bagaimanapun guru lebih suka mengajar ditempat asal mereka. Kepindahan guru sebagai akibat dari dorongan dalam diri (keinginan) individu guru untuk berada dekat dengan daerah asal. Maka, inilah salah satu tantangan pemerintah jika mendistribusikan guru ke wilayah tempat tugas yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Pemda harus mempertimbangkan dan memastikan bahwa guru yang akan dipindahkan diberi jaminan ekonomi lebih baik, sedangkan di Kabupaten Aceh Tengah sendiri, tunjangan dan rumah tempat tinggal telah diberikan agar guru mau bertahan di daerah terpencil, namun setelah beberapa lama dimutasi/ditugaskan, guru tersebut meminta kembali ke kota dengan berbagai alasan, bahkan menolak atau meninggalkan tunjangan untuk daerah terpencil guna pindah ke kota.

b. Guru Pensiun

Sampai saat ini, belanja pegawai APBK Aceh Tengah masih lebih dari 50% dan tidak memungkinkan diadakannya seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil guru walau pun sangat dibutuhkan, sehingga tenaga PNS guru akan terus berkurang. Pada Tabel 10. menunjukkan dari total 267 guru PNS yang pensiun, sebanyak 126 guru merupakan guru kelas, 81 guru agama, 3 guru penjaskes, 35 kepala sekolah.

Angka pensiun bertambah pada tahun 2018 cukup besar jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya sebanyak 73 guru. Seharusnya, angka pensiun ini juga menjadi salah satu dasar untuk melakukan rekrutmen pada tahun berikutnya demi mengatasi kekurangan guru karena pensiun, akibat tidak adanya penambahan guru PNS, kesenjangan antara jumlah guru yang ada dan jumlah guru yang seharusnya ada dari tahun ke tahun akan semakin besar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan secara deskriptif mengenai “Analisis penempatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Aceh Tengah” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penempatan dan pemerataan guru PNS tidak terlepas dari kebutuhan guru PNS pada suatu sekolah dan penempatan guru PNS di kabupaten Aceh Tengah masih belum merata karena sebanyak 11 Sekolah Dasar (SD) Negeri yang tidak memiliki satu pun tenaga pendidik guru PNS sedangkan ada 3 kecamatan yang kelebihan guru PNS baik guru kelas atau pun guru mata pelajaran.
2. Adapun yang menjadi kendala dalam pemerataan Guru PNS di Kabupaten Aceh Tengah adalah banyaknya guru PNS SD Negeri yang masuk usia pensiun, sedangkan untuk merekrut PNS yang baru mengalami keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kekurangan guru, sekolah menggunakan 15% dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mengangkat guru kontrak sebagai tenaga pendidik, termasuk guru PNS mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan serta guru PNS mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Disamping itu, penempatan guru PNS di kabupaten Aceh Tengah masih terkendala dari ketersediaan jumlah PNS yang kurang, Belanja Pegawai sudah lebih dari 50% APBD kabupaten sehingga tidak dapat menambah jumlah PNS guru, sedangkan Dinas Pendidikan hanya memprioritas ketercukupan guru PNS

di sekitar perkotaan sehingga daerah yang jauh dari perkotaan mengalami kekurangan guru.

B. Saran

1. Pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dapat memaksimalkan penempatan guru PNS yang ada di perkotaan ke daerah-daerah yang tidak memiliki guru pendidik PNS sama sekali di daerah terpencil.
2. Terhadap banyak guru PNS yang pensiun diharapkan kepada pemerintah agar mengusulkan formasi kebutuhan guru ke MenpanRB dan sambil menunggu adanya guru PNS, diharapkan dapat memaksimalkan pemberdayaan guru kontrak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, A. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, M. 1985. *Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Ametembun, N.A. 1973. *Guru Dalam Administrasi Sekolah Pembangunan*. Bandung : FKIP.
- Amatembun, N.A. 1978. *Manajemen Kelas*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. 1998. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bafadal, I. 2006. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah dasar Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Bumi Aksara. Jakarta
- _____. 2008. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. 4.
- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cherrington, D.J., 1994. *Organization Behavior; The Management of Individual and Organizational Performance*, A Division of Simon of Schulter Inc, New York
- Dakir. 1989. *Studi Mengenai Kebutuhan Guru-guru SMA yang Diharapkan dalam Hubungan dengan Tugas Mengajar*. Yogyakarta: P3-IKIP
- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. 2008. *Penilaian Kinerja Guru*.
- Djamarah, S.B. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartani. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Ihsan, F. 2008. *Dasar-dasar kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Gaffar, M.F. 1987. *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*. Jakarta:-.
- Gaffar, M.F. 2007. *Seminal Nasional Pendidikan Profesi-Sertifikasi Guru dan Prosfek LPTK*.
- Hamalik, O. 2005. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta; Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Handoko. T.H. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE, cet. 15, hlm. 69
- Hasbullah. 2005. *Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta. Penerbit: PT RajaGrasindo Persada.
- Hasibuan, S.P.M. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ibrahim Bafadal. 2008. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. 4, hlm. 22
- Ilyas, Y. 1999. *Kinerja Teori Penilaian dan Penelitian*. Fekom UI, Jakarta.
- Jalal, F dan Supriadi, D. 2001, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Jay, R. 2008. *Berpikir cepat: Wawancara Seleksi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jhingan (2006)
- Komariah, Aan dan Satori, Djam'an. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kunandar, 2011. *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta; Rajawali Press.
- Maunah, B. 2009. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Mundi'U (2013)
- Martoyo, S. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyasa, E. 2009. *Praktik Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Rosdakarya
- Ngalim, P. 2007. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nurfuadi. 2012. *Profesionalisme Guru*. Purwokerto: STAIN Press.
- Sagala, S. 2013. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Samsudin, S. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka setia, cet. 1, hlm. 81
- Sardiman, A.M. 2006. *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sarimaya. F. 2008. *Sertifikasi guru: apa, mengapa dan bagaimana?*. Bandung: Yrama Widya
- Sidi. I.J. 2004. *Pelayanan Profesional, Kegiatan Belajar-Mengajar yang Efektif*. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjo. 2006. *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek*. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. Jakarta.
- Sulistiyani, A.T. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sumaatmadja, Nursid. 1981. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa, Keruangan*. Bandung : Alumni.
- Sutrisno, E. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana.
- Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Tilaar, A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tresiana, N. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. LP Universitas Lampung. Lampung
- Zainal, A. 2002. *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*. Surabaya: Insan Cendikia.

Jurnal Penelitian

Gigona, S. 2017. *Penataan dan Pemerataan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Jurnal Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Vol. 2. No. 1. Hal. 184-198

Jaedun, A. 2011. *Manajemen Sumber Daya Guru Pada SMK RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Hasil penelitian dana DIPA UNY. Yogyakarta.

Michel, Jesse S., Mitchelson, Jacqueline K., Pichler, Shaun., Cullen Kristin L. (2010). *Clarifying relationships among work and family social support, stressors, and work-family conflict*. Journal of Vocational Behavior 76 (2010) 91–104

Nurhayati. 2014. *Perbedaan Pengaruh Fungsi Guru (Guru Bidang Studi Dengan Guru Kelas) Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Tingkat IQ Siswa*. Jurnal Formatif. 4 (2): 140-149. ISSN: 2088-351X

Sunandar, A. 2006. "Analisis Perencanaan Kebutuhan Guru". Jurnal Manajemen Pendidikan (Nomor 1 Tahun II). Hlm. 1- 13.

Wibowo, G. D. A. 2015. *Pemilihan dan Penggunaan Media Pembelajaran oleh Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kembaran*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 58 Tentang Guru

Peraturan Bersama Lima Menteri No 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil

Juknis Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Kementrian Tahun 2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru di Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota

Website

Akadum, 1999. Potret Guru Memasuki Milenia Ketiga. Suara Pembaharuan. <http://www.suarapembangunan.com/News/1999/01/220199/OpEd>, diakses 7 maret 2018.

Saroni, Muhammad. 2011. Manajemen Sekolah Kita Menjadi Pendidik Yang Kompeten. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
<https://vhajrie27.wordpress.com/2010/04/21/pkbm-sebagai-lembaga-pendidikan-nonforma/> Diakses tanggal 6 Maret 2018.



**Lampiran 1. Pedoman Wawancara
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah**

Nama Informan :

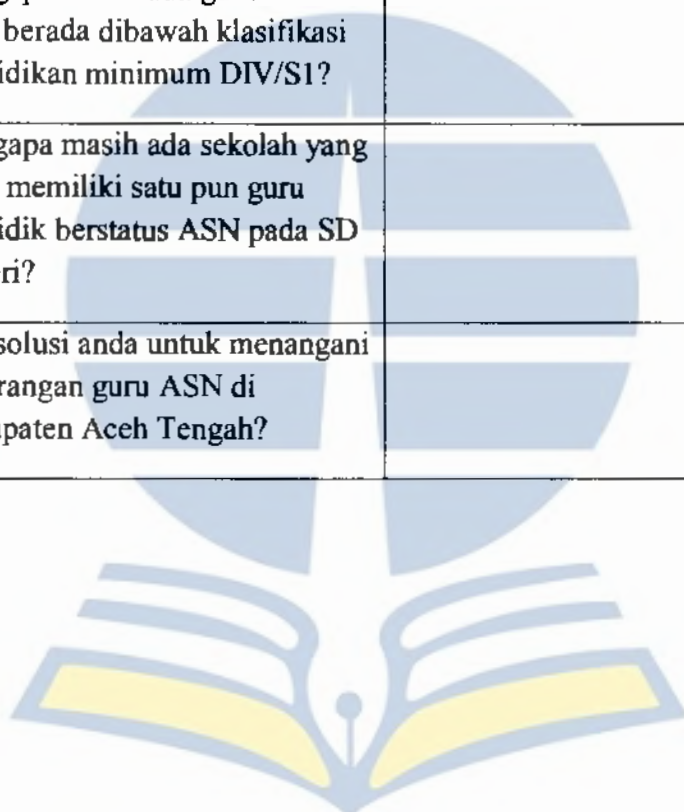
Jabatan Informan :

Instansi Informan :

Tanggal wawancara :

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Bagaimana rekrutmen ASN Guru SD Negeri?	
2.	Apa langkah yang diambil untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah-sekolah?	
3.	Apakah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memiliki kebijakan/aturan/qanun terhadap penempatan ASN guru?	
4.	Apakah dinas melakukan seleksi ASN guru SD negeri?	
5.	Bagaimana prosedur penugasan/penempatan guru ASN ke daerah terpencil atau ke sekolah yang kekurangan guru ASN?	
6.	Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyebaran dan penempatan guru di Aceh Tengah?	
7.	Apa alasan guru ASN tidak mau dipindahkan ke daerah terpencil atau ingin dipindahkan ke daerah perkotaan/dekat dengan daerah perkotaan?	

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
8.	Apakah dinas memberikan imbalan berupa finansial atau rumah dinas kepada guru ASN yang mau mengajar di daerah terpencil?	
9.	Apakah ada program dari dinas untuk pengembangan guru seperti peningkatan jenjang pendidikan?	
10.	Apakah ada program dari dinas untuk pengembangan guru seperti pelatihan?	
11.	Mengapa masih ada guru ASN yang berada dibawah klasifikasi pendidikan minimum DIV/S1?	
12.	Mengapa masih ada sekolah yang tidak memiliki satu pun guru pendidik berstatus ASN pada SD Negeri?	
13.	Apa solusi anda untuk menangani kekurangan guru ASN di Kabupaten Aceh Tengah?	



Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Tengah

Nama Informan :

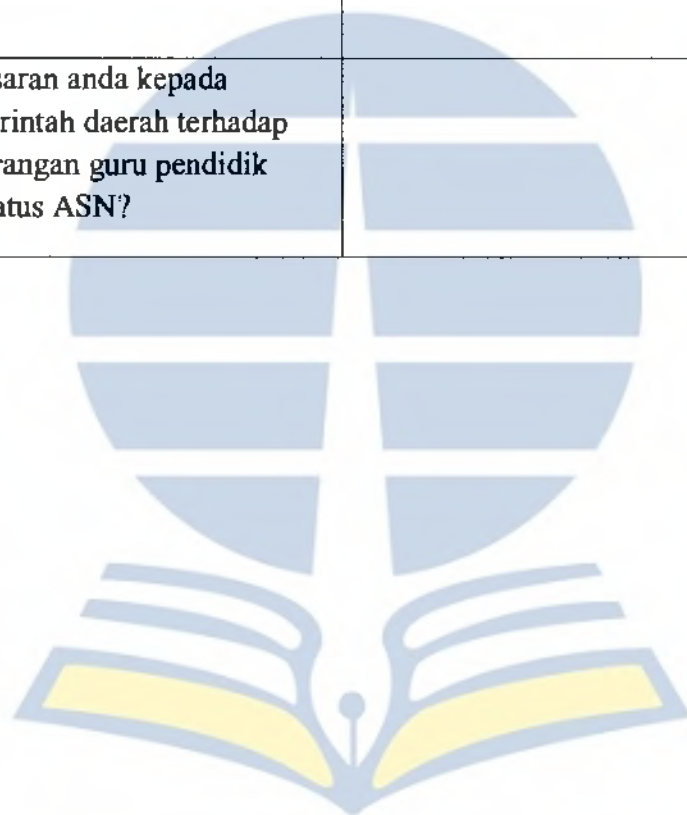
Jabatan Informan :

Instansi Informan :

Tanggal wawancara :

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Bagaimana ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran?	
2.	Apa yang dilakukan sekolah jika guru kurang dalam proses mengajar, apakah ada penggabungan kelas?	
3.	Apakah ruangan kelas dan meja serta kursi mencukupi bagi murid dan guru?	
4.	Bagaimana kualifikasi dan kompetensi guru?	
5.	Apakah ada pengembangan karir guru berupa peningkatan jenjang pendidikan?	
6.	Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada guru kelas, guru agama dan penjaskes?	
7.	Apakah dilakukan evaluasi kinerja guru?	
8.	Bagaimana jam kerja guru per minggu?	
9.	Apa langkah yang diambil untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah?	

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
10.	Apakah sekolah melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon guru?	
11.	Apakah ada dampak dari kekurangan guru ASN terhadap proses belajar mengajar?	
12.	Sarana dan Prasarana apa yang sangat dibutuhkan oleh sekolah anda?	
13.	Apa keluhan dari guru ASN yang ditugaskan dari tempat lain?	
14.	Apa saran anda kepada pemerintah daerah terhadap kekurangan guru pendidik berstatus ASN?	



Guru PNS Sekolah Dasar Negeri

Nama Informan :

Jabatan Informan :

Instansi Informan :

Tanggal wawancara :

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Bagaimana ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran?	
2.	Apa yang dilakukan sekolah jika guru kurang dalam proses mengajar, apakah ada penggabungan kelas?	
3.	Apakah ruangan kelas dan meja serta kursi mencukupi bagi murid dan guru?	
4.	Apakah ada pengembangan karir guru berupa peningkatan jenjang pendidikan?	
5.	Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada guru kelas, guru agama dan penjaskes?	
6.	Apakah dilakukan evaluasi kinerja guru?	
7.	Bagaimana jam kerja guru per minggu?	
8.	Apa langkah yang diambil untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah?	

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
9.	Apakah sekolah melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon guru?	
10.	Apakah ada dampak dari kekurangan guru ASN terhadap proses belajar mengajar?	
11.	Apakah ada guru ASN yang pulang hari dari kota ke desa?	
12.	Apakah ada tunjangan finansial terhadap guru ASN di daerah terpencil atau jauh dari perkotaan?	
13.	Apakah ada bantuan rumah dinas untuk guru ASN di daerah terpencil atau jauh dari perkotaan?	
14.	Jika ada, apakah berpengaruh terhadap keinginan untuk menetap di daerah terpencil?	
15.	Jika tidak, apakah ada keinginan bantuan finansial atau rumah dinas itu berikan?	
16.	Apa kendala dalam melakukan proses belajar mengajar di daerah terpencil?	
17.	Apa saran anda kepada pemerintah daerah terhadap kehidupan guru ASN di daerah terpencil?	

Lampiran 2. Pedoman Observasi

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Sumber Daya guru dan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri.

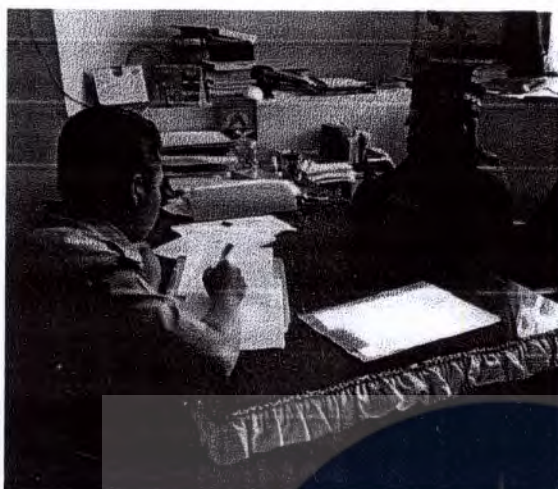
No	Situasi yang diamati	Hasil pengamatan
1	Lokasi Sekolah	
2	Keadaan Peserta Didik	
3	Keadaan Sarana dan Prasarana	
4	Keadaan SDM Pendidik PNS	
5	Proses Belajar Pengajar	

Lampiran 3. Pedoman Studi Dokumentasi

No	Jenis Dokumentasi
1.	Data jumlah kecamatan dan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017
2.	Data jumlah sekolah SD Negeri per kecamatan, jumlah rombel per sekolah di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017
3.	Jumlah peserta didik SD Negeri di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2014-2017
4.	Data guru pendidik PNS, jumlah guru kelas, jumlah guru pendidikan agama, jumlah guru penjaskes dan kualifikasi akademik guru tahun 2017
5.	Data jumlah kepala sekolah dan kualifikasi pendidikan kepala sekolah tahun 2017
6.	Data jumlah guru pensiun di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2018
7.	Data ketersediaan dan kebutuhan guru PNS per SD Negeri pada semua kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah.
8.	Dokumen kebijakan/qanun dan program RAPBK Aceh Tengah yang dibuat pemerintah untuk mendukung penataan dan penempatan guru pada tahun 2017-2018



Lampiran 4. Dokumentasi kegiatan wawancara



a. Wawancara dengan sekretaris Disdik

b. Wawancara dengan Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Aparatur pada BKPSDM



Wawancara dengan Kepala Seksi Mutasi dan Kepangkatan

Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan Observasi



Sarana & Prasarana Sekolah Dasar Negeri



Lokasi Sekolah Dasar Negeri



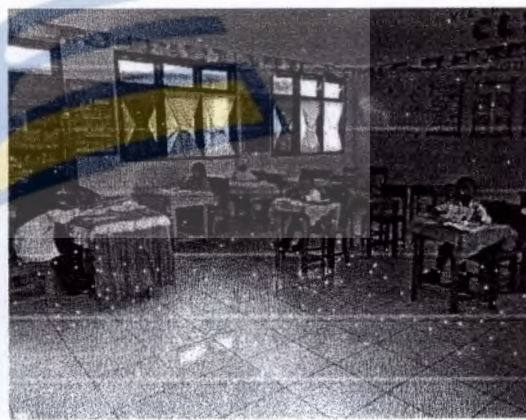
Kegiatan Upacara SD Negeri



Proses Belajar Mengajar



Bangunan SD Negeri 2 Pegasing



Proses Belajar SD Negeri 2 Pegasing

Lampiran 5. Dokumentasi Telaah Dokumen

1. Telaah dokumen SD Negeri Kecamatan Kute Panang

REKAPITULASI KEMUTUHAN GURU PNS SD NEGERI KUTE PANANG
TAMAH 2018

No	Nama Sekolah	IPK	Jumlah Guru	IG & PAI	IG & PCK	IG ADA	IG ADA	G PAJ NG ADA	G PCK ADA	SELISIH KELAS	SELISIH PAI	SELISIH PCK	KET
1	SDN 1 KUTE PANANG	10107164	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
2	SDN 2 KUTE PANANG	10102236	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
3	SDN 3 KUTE PANANG	10102173	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
4	SDN 4 KUTE PANANG	10102428	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
5	SDN 5 KUTE PANANG	10102297	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
6	SDN 6 KUTE PANANG	10102443	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
7	SDN 7 KUTE PANANG	10102331	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	SDN 8 KUTE PANANG	10102172	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
9	SDN 9 KUTE PANANG	10102312	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
10	SDN 10 KUTE PANANG	10102205	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
11	SDN 11 KUTE PANANG	10107166	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
12	SDN 12 KUTE PANANG	10102427	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
13	SDN 13 KUTE PANANG	69900255	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
JUMI			75	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0

Kute Panang, 14 Maret 2018
 Kepala SD Negeri Kecamatan Kute Panang
 Dwi. Subandjari
 NIP. 196601061 198803 1 001

3. Telaah dokumen SD Negeri Kecamatan Linge

REKAPITULASI KEBUTUHAN GURU PNS SD KECLINGE
TAHUN 2018

No	Nama Sekolah	NPWP	Jumlah Rombel	KG	KG KELAS	KG G. PAI	KG G. POK	KG KEKAS	KG G. POK ADA	KG KEKAS ADA	KG POK ADA	KG KEKAS ADA	KG POK ADA	KG KEKAS ADA	Selisih G. PAI	Selisih G. KELAS	Selisih G. POK	KET
1	SDN 1 LINGE	10102453	6	6	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	-2	-1	-1	
2	SDN 2 LINGE	10102157	7	7	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	-4	-1	-1	
3	SDN 3 LINGE	10102165	6	6	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-4	-1	-1	
4	SDN 4 LINGE	10102426	6	6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	-3	-1	-1	
5	SDN 5 LINGE	10102458	6	6	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	-2	-1	-1	
6	SDN 6 LINGE	10102403	6	6	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-4	0	-1	
7	SDN 7 LINGE	10102216	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-5	0	0	
8	SDN 8 LINGE	10102460	6	6	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	0	0	-1	
9	SDN 9 LINGE	10102429	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-4	-1	-1	
10	SDN 10 LINGE	10102412	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-5	0	0	
11	SDN 11 LINGE	10102309	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-3	-1	0	
12	SDN 12 LINGE	10102199	5	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-3	-1	-1	
13	SDN 13 LINGE	10102410	6	6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	-3	-1	-1	
14	SDN 14 LINGE	10102417	6	6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	-3	-1	-1	
15	SDN 15 LINGE	10102174	6	6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	-3	-1	-1	
16	SDN 16 LINGE	10102206	6	6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	-3	-1	-1	
17	SDN 17 LINGE	10102173	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-5	0	-1	
18	SDN 18 LINGE	10102171	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-5	-1	-1	
19	SDN 19 LINGE	10102322	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-5	-1	0	
20	SDN 20 LINGE	69974761	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-5	-1	-1	
21	SDN 21 LINGE	69993225	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-6	-1	-1	
22	SDN 22 LINGE	69902531	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-3	-1	-1	
Jumlah			117	127	22	22	22	47	5	4	4	4	4	-80	-17	-18		

Takengon, Maret 2018

Disetujui Oleh: Pensektoran

(Masa Pensiun/Keanggotaan Tersebut)



Dr. MASALUDIN
P. Sembilan (Gubernur/ Wakil
No. 163/Ep/180033 1 001

4. Telaah dokumen SD Negeri kecamatan Kebayakan

REKAPITULASI KEBUTUHAN GURU PNS SD-KEC.KEBAYAKAN TAHUN 2018

No. Urut	Nama Sekolah	NPSN	Jumlah Gombel	KG G.KELAS	KG G.PAI	KG G.PPDK	Jumlah Guru Ada	Jumlah Guru Tidak Ada	Jumlah Guru Tidak Ada	Jumlah Guru Tidak Ada	Seluruh Guru Ada	Seluruh Guru Tidak Ada	Ket
							ISTIMELAS GURU ADA	ISTIMELAS GURU ADA	ISTIMELAS GURU ADA	ISTIMELAS GURU ADA	ISTIMELAS GURU ADA	ISTIMELAS GURU ADA	
1	SDN 1 KEBAYAKAN	10102352	6	6	1	1	7	1	1	1	1	2	
2	SDN 2 KEBAYAKAN	10102213	6	6	1	1	7	1	1	1	1	0	
3	SDN 3 KEBAYAKAN	10102202	9	9	1	1	9	1	1	1	1	0	
4	SDN 4 KEBAYAKAN	10102467	6	6	1	1	7	1	1	1	0	1	
5	SDN 5 KEBAYAKAN	10102404	6	6	1	1	6	1	1	1	0	0	
6	SDN 6 KEBAYAKAN	10102235	6	6	1	1	5	1	1	1	0	0	
7	SDN 7 KEBAYAKAN	10102195	6	6	1	1	7	1	1	1	0	0	
8	SDN 8 KEBAYAKAN	10102416	17	12	2	2	13	1	1	1	1	0	
9	SDN 9 KEBAYAKAN	10102314	6	6	1	1	7	1	1	1	0	0	
Jumlah			63	63	10	10	58	10	13	5	0	3	


Telukrejon, Maret 2018
 Dinas Pendidikan
 Kabupaten Aceh Tenggara
 Dr. M. AGARUDDIN
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Aceh Tenggara
 NIP. 19581006 198603 1 001

5. Telaah dokumen SD Negeri kecamatan Bies

**REKAPITULASI KEBUTUHAN GURU PNS SD KEC. BIES
TAHUN 2018**

No	Nama Sekolah	NPSN	Jumlah Guru PNS	Jumlah Kelas	KG GPAI	KG GPIK	G Jelas ng ada	G Tatp ng ada	G Pjok ng ada	Selisih G Kelas	Selisih G PAI	Selisih G Pjok	Ket
1	SDN 1 BIES	10102433	6	6	1	1	6	1	1	0	0	0	
2	SDN 2 BIES	10102197	6	6	1	1	6	2	3	0	0	0	
3	SDN 3 BIES	10102689	6	6	1	1	6	1	1	0	0	0	
4	SDN 4 BIES	10102446	6	6	1	1	6	2	1	0	1	0	
5	SDN 5 BIES	10102454	6	6	1	1	6	1	1	1	0	0	
6	SDN 6 BIES	10102171	6	6	1	1	6	2	2	3	1	1	
7	SDN 7 BIES	10102211	6	6	1	1	6	1	1	1	0	0	
Jumlah			42	42	7	7	37	10	8	5	3	1	

Talangson, 1 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tenggara



6. Telaah dokumen SD Negeri kecamatan Lut Tawar

REKAPITULASI KEALTIKSIAN GURU PNS SD KECLUT TAWAR TAHUN 2018

	NPSN	Jumlah Rombel	KG Guru Kelas	KG G PAI	KG G PIK	G Kelas yg Ada	G PAI yg Ada	GPIK yg Ada	Selusi G Kelas	Selusi G PAI	Selusi G PIK	KET
1 SDN 1 LUT TAWAR	10102358	12	6	1	1	1	1	1	0	1	0	
2 SDN 2 LUT TAWAR	10102166	6	6	1	1	1	1	1	3	1	0	
3 SDN 3 LUT TAWAR	10107163	6	6	1	1	1	1	1	0	0	0	
4 SDN 4 LUT TAWAR	10102396	11	12	2	2	1	1	1	1	1	0	
5 SDN 5 LUT TAWAR	10102401	6	6	1	1	1	1	1	2	0	0	
6 SDN 6 LUT TAWAR	10102187	7	7	1	1	1	1	1	1	0	0	
7 SDN 7 LUT TAWAR	10102487	6	6	1	1	1	1	1	0	1	0	
8 SDN 8 LUT TAWAR	10102455	12	12	2	2	1	1	1	1	0	0	
9 SDN 9 LUT TAWAR	10102332	14	14	2	2	1	1	1	2	0	0	
10 SDN 10 LUT TAWAR	10102313	8	8	1	1	1	1	1	3	0	0	
11 SDYATASAN PENDIDIKAN ISLAM	10102322	5	6	1	1	1	1	1	2	2	1	
Jumlah		95	95	15	15	15	15	15	3	2	1	

Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah
 Drs. MUBARRUDDIN
 NIP. 19651206196800311001

8. Telaah dokumen SD Negeri kecamatan Bintang

REKAPITULASI KEBUTUHAN GURU PNS SD, KEC. BINTANG
TAHUN 2018

No	Nama Sekolah	NPSN	Jumlah Rombel	KG Guru Kelas	KG G PAI	KG G PDK	KG Kelas yg Ada	G PAI yg Ada	G SD/PAK yg Ada	SelisiH G Kelas	SelisiH G PAI	SelisiH G PDK	KET
1	SDN 1 BINTANG	10102317	6	6	1	1	58	0	0	-1	-1	-1	
2	SDN 2 BINTANG	10102415	6	6	1	1	34	1	1	-2	0	0	
3	SDN 3 BINTANG	10102355	8	6	1	1	78	1	1	0	0	-1	
4	SDN 4 BINTANG	10102238	6	6	1	1	41	0	0	-2	-1	0	
5	SDN 5 BINTANG	10102405	6	6	1	1	53	0	0	1	0	0	
6	SDN 6 BINTANG	10102425	6	6	1	1	13	0	0	-3	-1	-1	
7	SDN 7 BINTANG	10102420	6	6	1	1	77	0	0	1	-1	-1	
8	SDN 8 BINTANG	10102411	6	6	1	1	5	1	1	0	0	-1	
9	SDN 9 BINTANG	10102482	6	6	1	1	4	1	1	-2	0	0	
10	SDN 10 BINTANG	10102258	6	6	1	1	6	0	0	0	-1	-1	
11	SDN 11 BINTANG	10112413	6	6	1	1	5	0	0	-1	-1	-1	
12	SDN 12 BINTANG	10111921	6	6	1	1	0	1	1	-5	0	-1	
13	SDN 13 BINTANG	10113446	6	6	1	1	16	0	0	2	-1	0	
Jumlah			60	78	13	13	51	6	6	-5	-7	-5	

Tatungoh, Maret 2018
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Aceh Tengah

9. Telaah dokumen SD Negeri kecamatan Celala

REKAPITULASI KEBUTUHAN GURU/PNS SD KEC. CELALA
TARUUN 2018

		JMLAH DOKUMEN	KG G.KELAS	KG G.PAI	KG G.PDK	SELISIH G.PAI T.PADA	G.PAI G. KAWANG ADA	SELISIH G.KELAS	SELISIH G.PAI	SELISIH G.PIOK	KET
1	SDN 1 CELALA	10102040	6	1	1	1	1	6	0	0	
2	SDN 2 CELALA	10102041	6	1	1	1	1	5	1	-1	
3	SDN 3 CELALA	10102044	6	1	1	1	1	3	-1	-1	
4	SDN 4 CELALA	10102451	6	1	1	1	1	4	0	-1	
5	SDN 5 CELALA	10102419	6	1	1	1	1	4	1	-1	
6	SDN 6 CELALA	10102413	6	1	1	1	1	5	0	0	
7	SDN 7 CELALA	10102193	6	1	1	1	1	4	-1	-1	
8	SDN 8 CELALA	10102163	7	1	1	1	1	5	1	0	
9	SDN 9 CELALA	10102461	6	1	1	1	1	5	1	-1	
10	SDN 9 CELALA	10102165	6	1	1	1	1	5	1	0	
	JUMLAH		54	10	10	10	5	48	5	-6	


Takengori,
Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tenggara
Drs. MAHMOUDIN
Pangkat: Guru Muda
ACEH 190603 1001

10. Telaah dokumen kecamatan Silih Nara

**REKAPITULASI KEBUTUHAN GURU PNS SD KEC. SILIH NARA
TAHUN 2018**

No	Nama Sekolah	NPSN	JUMLAH ANAK	KG GURU KELAS	KG G PAI	KG G PIOK	G. KELAS FKG ADA	G PAI YG ADA	G PIOK YG ADA	SELISIH G KELAS	SELISIH G PAI	SELISIH G PIOK	KET
1	SDN 1 SILIH NARA	10102357	6	6	1	1	2	1	1	2	0	0	
2	SDN 2 SILIH NARA	10102330	6	6	1	1	5	1	1	1	-1	0	
3	SDN 3 SILIH NARA	10102351	6	6	1	1	4	1	1	0	0	0	
4	SDN 4 SILIH NARA	10102318	6	6	1	1	6	2	2	0	1	-1	
5	SDN 5 SILIH NARA	10102451	6	6	1	1	3	1	1	3	0	0	
6	SDN 6 SILIH NARA	10102338	6	6	1	1	4	1	1	2	0	-1	
7	SDN 7 SILIH NARA	10102455	9	9	1	1	7	2	2	-2	1	-1	
8	SDN 8 SILIH NARA	10102466	8	8	1	1	8	2	2	0	1	1	
9	SDN 9 SILIH NARA	10102418	6	6	1	1	5	1	1	1	0	0	
10	SDN 10 SILIH NARA	10102160	8	8	1	1	3	1	1	-5	0	0	
11	SDN 11 SILIH NARA	10102214	6	6	1	1	2	1	1	4	0	-1	
12	SDN 12 SILIH NARA	10102233	6	6	1	1	5	1	1	1	0	0	
13	SDN 13 SILIH NARA	10102408	6	6	1	1	3	1	1	3	0	0	
14	SDN 14 SILIH NARA	10102448	6	6	1	1	2	1	1	4	-1	0	
15	SDN 15 SILIH NARA	10102432	6	6	1	1	6	2	2	0	-1	0	
16	SDN 16 SILIH NARA	10107474	6	6	1	1	6	2	2	0	1	-1	
17	SDN 17 SILIH NARA	10110723	6	6	1	1	3	1	1	4	-1	-1	
18	SDN 18 SILIH NARA	10111865	6	6	1	1	1	1	1	6	-1	-1	
Jumlah			115	115	18	18	61	17	15	34	-1	-6	

Tanggal: Meret, 2018
 Drs. Anwaruddin
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Aceh Tengah




Drs. Anwaruddin
 ACEHTI Embay Urama Kuala
 No. 18001006-190003-1-001

11. Telaah dokumen SD Negeri kecamatan Pegasing

**REKAPITULASI KEBUTUHAN GURU PNS SD KEC. PEGASING
TAHUN 2018**

No	SD	NPSN	BILANGAN ROMBEL	KG GURU KELAS	KG G. PAI	KG G. PJK	KG KLAS ADA	KG KLAS ADA	KG PAI ADA	KG PAI ADA	SELISIH KELAS	SELISIH PAI	SELISIH PJK	HET
1	SDN 1 PEGASING	10107315	6	6	1	1	6	6	2	0	0	1	0	
2	SDN 2 PEGASING	10107331	7	7	1	1	7	7	1	0	0	0	0	
3	SDN 3 PEGASING	10107350	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
4	SDN 4 PEGASING	10107353	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
5	SDN 5 PEGASING	10107468	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
6	SDN 6 PEGASING	10107456	6	6	1	1	6	6	2	0	0	0	0	
7	SDN 7 PEGASING	10107398	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
8	SDN 8 PEGASING	10107200	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
9	SDN 9 PEGASING	10107159	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
10	SDN 10 PEGASING	10107434	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
11	SDN 11 PEGASING	10107170	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
12	SDN 12 PEGASING	10107275	6	6	1	1	6	6	2	0	0	0	0	
13	SDN 13 PEGASING	10107175	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
14	SDN 14 PEGASING	10107152	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
15	SDN 15 PEGASING	10107170	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
16	SDN 16 PEGASING	10107167	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
17	SDN 17 PEGASING	10107818	4	4	1	1	4	4	1	0	0	0	0	
18	SDN 18 PEGASING	10107871	6	6	1	1	6	6	1	0	0	0	0	
Jumlah			107	107	18	18	108	108	15	13	9	3	5	

Telagacong, Maret 2018

Direktora

 Dir. RASARUDDIN
 Kabupaten Uluwu, Mada
 Kabupaten Aceh Tenggara
 1981006198100811037

13. Telaah dokumen SD Negeri kecamatan Bebesen

**REKAPITULASI KEBUTUHAN GURU PNS SD KEC. BEBESEN
TAHUN 2018**

NO	KELOMPOK	NPSN	UMUR NO MIBEL	KG GURU KELAS	KG G PAI	KG G PAOK	KG ADA KG ADA	G PANG ADA	SELISIH G KELAS	SELISIH G PAI	SELISIH G PAOK	KET
1	SDN 1 BEBESEN	10102438	8	8	1	1	7	12	1	1	1	
2	SDN 2 BEBESEN	10102406	7	7	1	1	10	1	3	0	1	
3	SDN 3 BEBESEN	10102450	6	6	1	1	6	1	0	0	0	
4	SDN 4 BEBESEN	10102169	6	6	1	1	6	1	0	0	0	
5	SDN 5 BEBESEN	10102334	6	6	1	1	6	1	0	0	0	
6	SDN 6 BEBESEN	10102164	6	6	1	1	9	2	3	1	0	
7	SDN 7 BEBESEN	10102445	5	5	1	1	5	1	0	0	0	
8	SDN 8 BEBESEN	10102337	12	12	2	2	13	2	1	0	0	
9	SDN 9 BEBESEN	10102335	6	6	1	1	6	1	0	0	0	
10	SDN 10 BEBESEN	10102339	18	18	2	2	16	3	2	1	1	
11	SDN 11 BEBESEN	10102400	6	6	1	1	7	1	1	0	0	
12	SDN 12 BEBESEN	10102402	8	8	1	1	8	1	0	0	0	
13	SDN 13 BEBESEN	10102196	6	6	1	1	5	1	1	0	1	
14	SDN 14 BEBESEN	10102217	6	6	1	1	5	1	1	0	0	
15	SDN 15 BEBESEN	10102439	6	6	1	1	10	1	4	0	0	
16	SDN 16 BEBESEN	69787261	6	6	1	1	5	2	1	1	0	
17	SDN 17 BEBESEN	69964045	4	4	1	1	4	0	0	-1	-1	
JEMLAH				122	19	19	124	22	6	3	3	

Taklongon, Maret 2018
 Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara
 Drs. Muslatuddin
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara
 No. 4838/106-1980/3-1-001

14. Talaah dokumen SD Negeri kecamatan Atu Lintang

REKAPITULASI KEBUTUHAN GURU PNS SD KEC. ATU LINTANG
TAHUN 2018

No	Nama Sekolah	NIPSN	Jumlah Rombel	KG G. RELAS	KG G. PAI	KG G. PPOK	G. KELAS YG ADA	G. PAI YG ADA	G. POK YG ADA	G. KELAS SELISIH	G. PAI SELISIH	G. PPOK SELISIH	NET
1	SDN 1 ATU LINTANG	10102442	7	7	1	1	0	0	1	-3	-1	0	
2	SDN 2 ATU LINTANG	10102422	6	6	1	1	0	0	0	-3	-1	-1	
3	SDN 3 ATU LINTANG	10102441	6	6	1	1	1	1	0	1	-1	0	
4	SDN 4 ATU LINTANG	10102424	7	7	1	1	0	0	0	0	-1	-1	
5	SDN 5 ATU LINTANG	10102419	7	7	1	1	5	0	1	0	-1	-1	
6	SDN 6 ATU LINTANG	10102321	7	7	1	1	0	0	0	0	-1	-1	
7	SDN 7 ATU LINTANG	10102168	6	6	1	1	0	0	0	0	-1	-1	
8	SDN 8 ATU LINTANG	10102169	7	7	1	1	0	0	0	0	-1	-1	
9	SDN 9 ATU LINTANG	10112411	6	6	1	1	0	0	0	0	-1	-1	
10	SDN 10 ATU LINTANG	69875554	6	6	1	1	0	0	0	0	-1	-1	
11	SDN 11 ATU LINTANG	69953482	5	5	1	1	0	0	0	1	-1	0	
Jumlah			70	70	11	11	18	0	3	52	-11	0	-8

Takengori, Maret 2018
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Takengori

 Pambina, Lintang Mada
 Telp. (0810) 880031001

15. Telaah dokumen hasil rekapitulasi SD Negeri di Kabupaten Aceh Tengah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Takengon - Raq Kampang Rung Kel. Pegasing No. Telp. (0643) 7626412 Takengon Fax. 7626412 Takengon

REKAPITULASI PERHITUNGAN KEBUTUHAN, KEKURANGAN DAN KELEBIHAN GURU PNS SD
TAHUN 2018

Kabupaten/Kota *) Aceh Tengah
Provinsi Aceh
Jumlah Kecamatan/UPTD 14

No	Nama UPTD	JMLH ROMBEL	JMLH SISWA	KG Satuan Pendidikan									
				Pendidikan Agama			Penjaskes			Guru Kelas			
				KG	ADA	Selish	KG	ADA	Selish	KG	ADA	Selish	
1	KEC. LUT TAWAR	95	1934	15	15	-2	15	15	1	95	95	0	3
2	KEC. KEBAYAKAN	63	1067	10	10	0	10	10	3	63	63	0	5
3	KEC. KAPANANG	75	955	13	13	1	13	13	-5	75	75	0	21
4	KEC. BEBESAN	122	3123	19	19	3	19	19	3	122	122	0	6
5	KEC. PEGASING	107	1746	18	18	3	18	18	-5	107	107	0	9
6	KEC. BIES	42	662	7	7	3	7	7	1	42	42	0	5
7	KEC. RUSIP	60	1034	10	10	7	10	10	-7	60	60	0	98
8	KEC. SILIH NARA	115	2188	18	18	1	18	18	-6	115	115	0	34
9	KEC. KETOL	134	1596	22	22	-19	22	22	-16	134	134	0	70
10	KEC. BINTANG	80	1048	13	13	7	13	13	-8	80	80	0	17
11	KEC. CELALA	61	1239	10	10	-5	10	10	-6	61	61	0	44
12	KEC. ATU LINTANG	70	804	11	11	-11	11	11	-8	70	70	0	52
13	KEC. JAGONG	53	1079	9	9	-8	9	9	-8	53	53	0	15
14	KEC. LINGE	127	1763	22	22	-17	22	22	-18	127	127	0	80
KABUPATEN		1204	18938	297	297	-24	297	297	-72	1002	1002	0	399

Keterangan:
 P. Agama = Kebutuhan Guru
 Penjaskes = (Jmlh rombel x jmlh jam/minggu standar isi) / 24
 Guru Kls = (Jmlh rombel x 24 Jam) / 24

Takengon, Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tengah
(Signature)
Drs. NASARUDIN
Pembina Kelas IIa
NIP. 1966031001

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA
 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-U.T) Banda Aceh
 Jl. Pendidikan/Bahagia, Punge Blang Cur, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh 23234
 Telepon: 0651-44749, 44750; Faksimile: 0651-44757
 E-mail: ut-banda.ach@ut.ac.id

Nomor : 493 /UN31.22/KM/2018 07 Februari 2018
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian Tesis

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah
 Jl. Takengon-Isak Kamp. Pegasing
 Kabupaten Aceh Tengah


Kami informasikan bahwa mahasiswa kami, yaitu :

Nama : **HARI PRAWIRA**
 NIM : 501482884
 Prog. Studi : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik

akan melaksanakan penelitian tesis yang berjudul "Analisis Penempatan Guru Pegawai negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Aceh Tengah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon dengan hormat Bapak berkenan mengizinkan mahasiswa kami tersebut untuk melaksanakan penelitian yang Bapak pimpin pada periode Februari s/d April 2018.

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Dr. Lyla Nadia, MA, M.Si
 NIP. 19600724 198303 2 001